



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

2025 - 2029 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



☎ (0291) 685745

✉ dinsosp2pa@demakkab.go.id

🌐 dinsosp2pa.demakkab.go.id

📷 [dinsosp2pa_demak](https://www.instagram.com/dinsosp2pa_demak)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen “ **Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029**” ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Pemerintah Kabupaten Demak secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak tahun 2025-2029, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih baik di Kabupaten Demak. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas segala dukungan dan partisi pasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak pada khususnya.

Sehingga pembangunan di Kabupaten Demak dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak.

Demak, 19 September 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak



Agus Herawan, S.IP,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197106121990031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	6-7
	1.2. Landasan Hukum	7-10
	1.3. Maksud dan Tujuan	10-10
	1.4. Sistematika Penulisan	10-11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12-16
	2.1.2. Sumber Daya Dinsos P2PA Kab.Demak	16-23
	2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak	24-64
	2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	64-67
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial P2PA	67-67
	2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .	67-69
	2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya	70-79
	2.2.3. Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Sosial P2PA	79-82
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK	
	3.1. Tujuan dan Sasaran	83-86
	3.2. Strategi dan arah Kebijakan	87-87
	3.2.1. Strategi	87-88
	3.2.2. Kebijakan	88-91
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak	92-92

4.1.1 Dukungan Program Prioritas Bupati Wakil Bupati	92-97
4.1.2 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	98-124
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	125-127
BAB V	
PENUTUP	128-129
Lampiran Definisi Operasional Renstra Dinsosp2pa Tahun 2025-2029	130-153

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan

berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA) memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kesejahteraan social masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan , anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Dalam menghadapi dinamika social, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang , serta tantangan globalisasi dan perubahan iklim dibutuhkan perencanaan yang matang dan terarah agar kebijakan dan program yang dijalankan benar – benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P2PA Kabupaten Demak ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Jangka Menengah, serta merupakan instrument penting dalam memastikan sinergi dan keterpaduan antara program pusat, provinsi dan kabupaten. Renstra ini juga disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD Kabupaten Demak, RPJMN, serta regulasi nasional yang mengatur bidang sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Lebih dari itu, penyusunan Renstra Dinsos P2PA ini menjadi penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi , dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan masyarakat . Dalam prosesnya penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan secara tepat sasaran.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinsos P2PA Kabupaten Demak mampu menjadi institusi yang responsive, adaptif, dan inovatif dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok marginal dan rentan sehingga dapat terwujud masyarakat Demak yang sejahtera, inklusif dan berkeadilan sosial.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 ;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
 26. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ;
 27. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
 28. Perbub No 1 tahun 2025 tentang sistem kerja utk penyederhanaan birokrasi .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan

4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak , sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak . Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

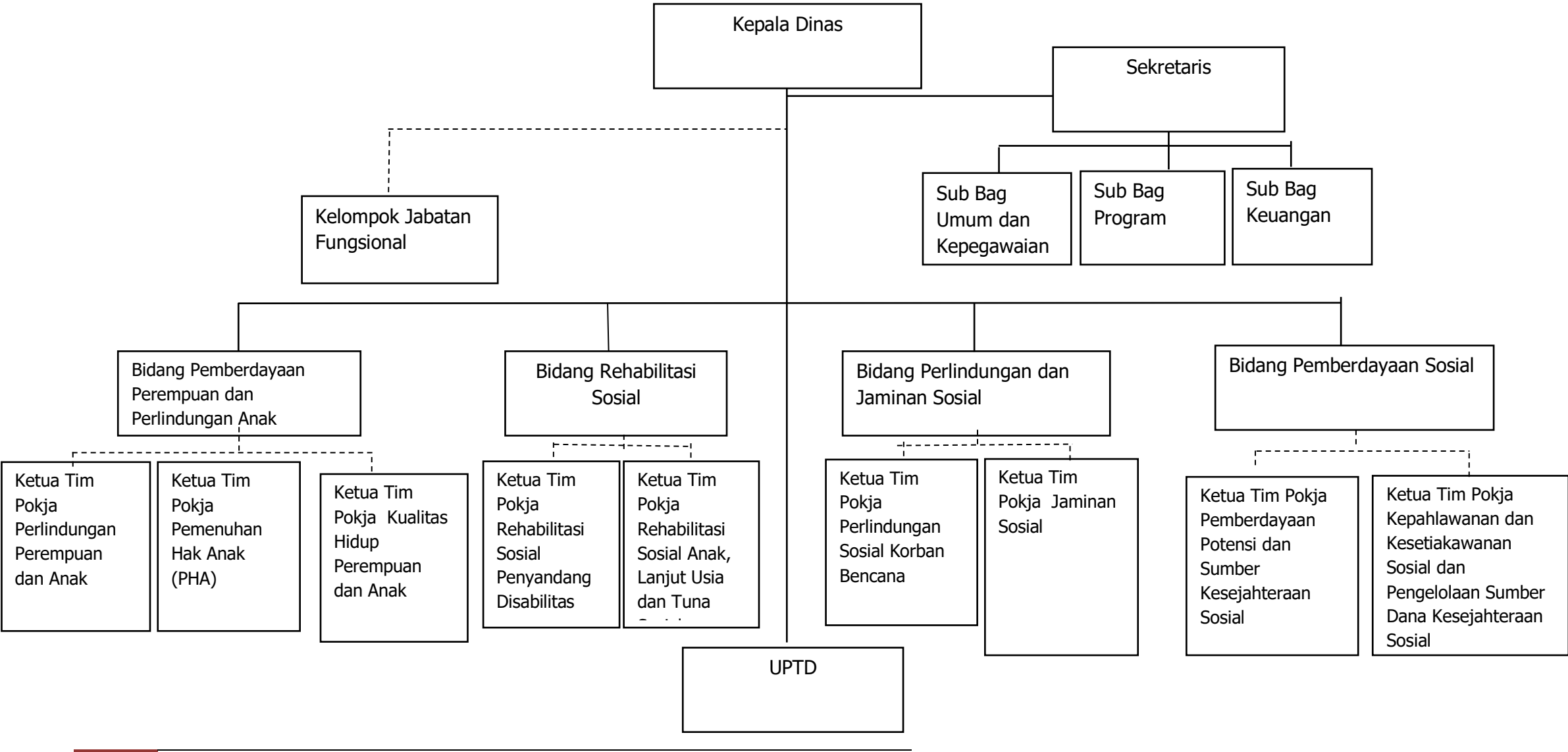
1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah

1. Sekretariat Dinas, melakukan fungsi :
 - a) menyiapkan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b) menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c) menyiapkan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
 - d) menyiapkan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e) menyiapkan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f) menyiapkan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g) menyiapkan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, melaksanakan fungsi :
 - a) menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b) menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial;

- c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan fungsi:
- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;
 - c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
 - d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi:
- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial;
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:
- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Anak;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinsos P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	1	0	1
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	2	0	2
2	SMA Sederajat	3	3	1	0	15	4	26
3	D3	0	1	2	0	0	1	4
4	S1	2	7	5	7	4	7	32
5	S2	3	3	0	0	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0	0	0

	Jumlah	8	14	8	7	22	12	71
--	--------	---	----	---	---	----	----	----

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak terdiri atas laki-laki sejumlah 38 orang dan perempuan sejumlah 33 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan jenis kelamin
di Dinsos P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	22	12	34
2	PPPK	8	7	15
3	PNS Golongan II	2	3	5
4	PNS Golongan III	4	10	14
5	PNS Golongan IV	2	1	3
	Jumlah	38	33	71

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinsosp2pa Kab.Demak tahun 2025 berjumlah 71 pegawai dengan 38 laki-laki dan 33 perempuan dengan demikian, rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan sekitar 1,15% ini menunjukan jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dari pegawai perempuan. Kemudian Jumlah pegawai berdasarkan golongan Non ASN yang paling tinggi sebanyak 34 orang, pppk 15 orang , golongan III sebanyak 14 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan terakhir golongan IV sebanyak 3 orang.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak . Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari APBD maupun APBN, dsb dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Aset Tanah Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna an	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah kampung	4028	1985	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	Hak pakai	11/21/1986	B 2140537 (HP 34)	Kantor DinsosP2PA Kab.Demak	Pembelia n	330,296	Bukti Sertifikat
2.	Tanah kampung	1856	1990	Jl. Pemuda	Hak pakai	08/09/2021	11.09.12 .18.4.00 074	Taman Makam Pahlawan Cahya Ratna Bintarum	Pembelia n	1,875,000	Bukti Sertifikat
3.	Tanah kampung	5172	1998	Jl. Pemuda Demak	Hak pakai	23/09/1986	B 2139964 (HP 33)	Uptd Rumpelsos	Pembelia n	791.252	Bukti Sertifikat
4.	Tanah kampung	344.96	2022	Desa Katonsari Belakang Timbanga n	Hak pakai	-	Proses	Panti Asuhan	Hibah	68,992	BA Penilaian no 030/669 Tahun 2022

Tabel 2.5
Gedung dan Bangunan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (LBK)	Baik	423	Jl. Sultan Trenggono	423	Tanah Milik Pemda	Pembelian	299,535,000
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rumpelsos)	Baik	5172	Jl. Pemuda Demak	5172	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49,775,000
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinsos P2PA)	Baik	650	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	650	Tanah Milik Pemda	Pembelian	177,579,000
4.	Pintu Pagar (Dinso P2PA)	Baik	20	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49,655,000
5.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	60	Jl. Kyai Singkil No.42	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68,601,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Demak				
6.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	170	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	170	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3,200,000
7.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	160	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	160	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68,000,000
8.	Pintu Pagar (Dinso P2PA)	Baik	50	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	91,738,000
9.	Gedung Garasi/Pool Permanen (Dinso P2PA)	Baik	170	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	170	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3,200,000
10.	Gedung Garasi/Pool Permanen (Dinso P2PA)	Baik	18	Jl. Kyai Singkil No.42	18	Tanah Milik	Pembelian	64,530,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Demak		Pemda		
11.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinso P2PA)	Baik	270	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	270	Tanah Milik Pemda	Pembelian	790,124,000
12.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinso P2PA)	Baik	90	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	90	Tanah Milik Pemda	Pembelian	199,220,000
13.	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (Komposter)	Baik	2	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	2	Tanah Milik Pemda	Hibah	4,140,530
14.	Konstruksi Pagar (Pagar Kelining Dinsos)	Baik	256	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	256	Tanah Milik Pemda	Pembelian	416,170,000
15.	Konstruksi Pagar (Pagar Halaman Dinsos)	Baik	60	Jl. Kyai Singkil No.42	60	Tanah Milik	Pembelian	198,820,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
				Demak		Pemda		
16.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung SLRT)	Baik	120	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	120	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198,930,000
17.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembangunan Rumah Singgah)	Baik	268	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	268	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,413,811,000
18.	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Paving)	Baik	20	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45,490,000

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak dari tahun 2022 – 2025 dipergunakan untuk perlindungan sosial ekonomi melalui jaminan ketenagakerjaan, penanggulangan bencana (banjir, kebakaran dan bencana alam lain) dengan bantuan logistik dan dapur umum, Perlindungan anak melalui pelatihan dan pencegahan kekerasan dan Dukungan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS / LKSA). Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti BPJS, BPBD, Baznas, PMI , Perangkat Daerah terkait hingga desa.

a. Capaian Kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Urusan Sosial

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		V	83,79	84,31	84,52	84,68	84,75	84,47	87,28	87,99	89,00	89,03	1,008	1,03	1,08	1,05	1,05
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		V	80,32	80,36	80,39	80,43	80,5	77,7	77,7	78,35	78,8	NA	96,73	96,68	97,46	97,97	NA
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%		V	100	100	100	100	100	NA	0,26	2,45	1,54	1,67	NA	0,26	2,45	1,54	1,67

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka		V	91,22	91,54	91,67	91,91	92,14	90.9	91.16	91.3	91.17	91.25	99,64	99.58	99.59	99.28	99.03
6	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka		V	69,36	69,36	70,32	70,32	70,32	69.36	69.36	69.36	69.36	69.36	100	100	98.63	98.63	98.63
7	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka		V	575,0 1	501- 600	501- 600	601- 700	601- 700	575.0 1	697.4 0	673.6 7	684.5 6	NA					
8	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase PPKS yang mandiri	%		V	0,26	0,45	0,73	1,6	1,65	0,26	2,45	1,54	1,67	1,52	1.0	5.44	2.1	1.04	0.92
10	Persentase Penurunan PPKS	%		V	8.27	8.27	8.66	8.24	8.23	8.44	8.82	8.93	9.15	NA	1.02	1.06	0.24	1.11	NA

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan indikator SPM)	%	V		100	100	100	100	100	98,31	100	100	100	100	98,31	100	100	100	100
12	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
13	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	V		95,00	95,57	95,67	95,77	95,87	66,27	100	100	100	100	69,76	104,53	104,53	104,42	104,31
14	Persentase PMKS yang tertangani	%	V		95,11	95,60	97,01	97,51	97,81	100	100	100	100	100	105,14	104,60	103,08	102,55	102,24
15	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	V		95,00	95,57	95,67	95,77	95,87	100	100	100	100	100	105,26	104,64	104,53	104,42	104,31

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
16	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	V		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	V		100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
19	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	V		39,5	40,01	40,05	40,09	40,13	34,02	17,51	27,48	24,11	NA	86,13	43,76	68,61	60,14	NA
22	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	V		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	6,39	3,92	8,11	9,34	NA	639	392	811	934	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
24	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	V		3,80	3,81	3,90	3,93	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	V		12	12	12	16	16	6	6	6	6	6	50	50	50	37,5	37.5
26	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	V		40,79	40,83	40,87	40,91	40,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Rasio KDRT	%	V		0,01	0,012	0,015	0,018	0,021	6,37	3,9	8,12	9,35		637	32500	54133,33	51944,44	
28	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	V		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	V		40,79	40,81	40,85	40,88	40,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
30	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
32	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	V		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
15	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Rasio APM Perempuan / Laki-Laki di SD	%			76,05	76,05	76,05	76,05	76,05	-	-	-	-		-	-	-	-	
18	Rasio APM perempuan /Laki-Laki di SMP	%			83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	-	-	-	-		-	-	-	-	
19	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%			79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	-	-	-	-		-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
20	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	%			48,7 4	48,7 4	48,7 4	48,7 4	48,7 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1	Nomor	11	Realisasi tahun pertama renstra disusun
2	Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)	12	Realisasi tahun kedua renstra disusun
3	Satuan kinerja	13	Realisasi tahun ketiga renstra disusun
4	Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan	14	Realisasi tahun keempat renstra disusun
5	Target dari kementrian terkait misalnya	15	Realisasi tahun kelima renstra disusun
6	Target awal atau tahun pertama renstra disusun	16	Rasio tahun pertama renstra disusun
7	Target tahun kedua renstra disusun	17	Rasio tahun kedua renstra disusun
8	Target tahun ketiga renstra disusun	18	Rasio tahun ketiga renstra disusun
9	Target tahun keempat renstra disusun	19	Rasio tahun keempat renstra disusun
10	Target tahun elima renstra disusun	20	Rasio tahun kelima renstra disusun

Rumus rasio adalah:
$$\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun}} \times 100\%$$

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun pertama hingga tahun terakhir RPJMD dapat dikatakan baik, jika realisasi anggaran belum terserap 100% tetapi sudah tercapai target sasaran kinerja melebihi 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya Anggaran APBN dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dapat dilihat pada Tahun 2022 hingga saat ini (2025) Pemerintah Pusat telah memberikan Program BPNT/Sembako kepada masyarakat terutama masyarakat sangat miskin dalam mensejahterakan ekonominya. Sehingga semakin kecil efisiensi anggaran yang disediakan dari anggaran APBD maka efektivitas anggaran semakin tinggi.

Dari hasil analisa diatas, maka faktor – faktor yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya PMKS yang tertangani, pada tahun 2022 dari target 34,73% telah tercapai 90,60%.
2. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan PUG dan PUHA, pada tahun 2022 dari target 45% telah tercapai 100%.

Program dan Kegiatan Pendukung tercapainya sasaran tahun 2022 berjalan ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak. Pada Tahun 2025 diadakan efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dengan mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran dan mengurangi pemborosan . Penggunaan efisiensi anggaran salah satunya di bidang perlindungan sosial

dipergunakan untuk peningkatan anggaran untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran (seperti PKH, BPNT, BLT). Sehingga anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semula Rp. 31.009.717.300,- menjadi Rp. 30.682.747.300,- mengalami penurunan sebesar 1,05 %

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,037,007,761	12,778,732,789	4,621,741,700	6,061,501,940	7,090,313,552	4,611,678,868	1,425,474,887	4,318,359,414	1,060,990,047	-	92	11	93	18	-	7,117,859,548	2,283,300,643
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8,000,000	8,263,000	16,000,000	20,000,000	-	14,435,150	8,139,500	-	-		180	99	-	-	10,452,600	4,514,930
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2,000,000	17.000.000	6,000,000	5,000,000		4,925,000	-	-			722	-	-	-	2,600,000	985,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2,000,000	4.000.000	4,000,000	5,000,000	-	3,901,650	-	-		-	246	-	-	-	2,200,000	780,330
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2,000,000	7,018,000	3,000,000	5,000,000	-	2,776,000	6,917,000	-		-	139	99	-	-	3,403,600	1,938,600

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2,000,000	1,245,000	3,000,000	5,000,000	-	2,832,500	1,222,500	-		-	142	-	-	-	2,249,000	811,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,811,890,300	12,007,262,589	4,613,478,700	6,045,501,940	7,070,313,552	3,420,345,151	3,407,076,384	4,310,219,914	1,060,990,047		90	28	93	18	-	6,709,689,416	2,439,726,299
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,229,269,351	9,126,216,589	3,757,927,300	5,151,598,000	6,270,313,552	2,936,812,756	475,790,820	3,502,279,714	859,239,656		91	5	409	17	-	5,507,064,958	1,554,824,589
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	512,621,310	2,881,046,000	855,551,400	893,903,940	800,000,000	483,532,395	475,790,820	807,940,200	201,750,391		94	17	94	23	-	1,188,624,530	393,802,761
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,037,007,761		1,148,518,923	2,594,540,200		4,611,678,868		1,048,602,029	54,782,500		92	-	91	2	1	1,756,013,377	1,143,012,679
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3,000,000	2,898,000	3,000,000	3,000,000	-	2,870,000	2,870,000			-	96	99	-	2	2,379,600	1,148,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3,000,000	2,898,000	3,000,000	3,000,000	-	2,870,000	2,870,000	-		-	96	99	-	3	2,379,600	1,148,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,000,000	23,000,000	191,050,000	287,550,000	180,000,000	149,617,562	174,838,800	184,827,000	-		100	760	97	-	4	166,320,000	101,856,672
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0-	0	0	75,750,000	- 0	-	-	-	-		-	-	-	-	5	15,150,000	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,000	23,000,000	191,050,000	208,800,000	177,000,000	149,617,562	171,978,800	184,827,000	-		100	748	97	-	6	149,970,000	101,284,672
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	2,860,000	-	-		-	95	-	-	7	1,800,000	572,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,212,700	371,004,078	301,995,000	311,083,500	784,000,000	349,122,550	359,201,988	295,870,239	42,421,600		100	97	98	14	8	423,659,056	209,323,275
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,115,000	4,997,810	11,474,400	15,000,000	35,000,000	29,059,450	13,491,001	10,910,000	7,834,000		96	270	95	52	9	19,317,442	12,258,890
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,008,700	60,000,000	94,207,500	104,263,500	250,000,000	82,993,600	91,190,100	91,487,900	10,629,600		100	152	97	10	10	118,295,940	55,260,240
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,219,000	6,998,100	31,642,100	40,000,000	15,000,000	11,213,500	24,908,000	31,142,500	18,958,000		100	356	98	47	11	20,971,840	17,244,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,050,000	30,000,000	16,000,000	20,000,000	30,000,000	9,050,000	17,085,500	14,537,600	-		100	57	91	-	12	21,010,000	8,134,620
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	5,978,168	4,000,000	4,000,000	14,000,000	2,990,000	4,380,000	3,790,000	840,000		100	73	95	21	13	6,195,634	2,400,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	5,000,000	5,605,000	10,000,000	20,000,000	-	10,300,000	5,447,500	-		-	206	97	-	14	8,121,000	3,149,500

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213,820,000	230,020,000	132,066,000	107,820,000	360,000,000	213,816,000	188,094,987	131,764,389	4,160,000		100	82	100	4	15	208,745,200	107,567,075
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	3,010,000	7,000,000	10,000,000	10,000,000	-	9,752,400	6,790,350	-		-	324	97	-	16	6,002,000	3,308,550
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	25,000,000	50,000,000		50,000,000	-	-	-	-		-	-	-	-	17	15,000,000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17,627,796,483	530,450,200	98,000,000	828,884,760	794,000,000	399,893,000	381,941,000	93,680,000			2	72	96	-	18	3,975,826,289	175,102,800
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,732,000	415,100,000	339,222,900	390,000,000	390,000,000	228,000,000	403,200,000	-	-		99	97	-	-	19	300,932,400	126,240,000
Pengadaan Mebel	-	49,950,200	10,000,000	162,183,200	50,000,000	-	49,820,000	9,780,000	-		-	100	98	-	20	54,426,680	11,920,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179,300,000	-	-	106,100,000	154,000,000	171,893,000	136,400,000	-	-		96	-	-	-	21	87,880,000	61,658,600
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	91,771,560	25,000,000	-	181,121,000	-	-		-	-	-	-	22	23,354,312	36,224,200

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	65,400,000	-	-	175,000,000	-	14,600,000	-	-		-	22	-	-	23	48,080,000	2,920,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102,700,000	506,200,000	197,771,000	228,771,000	254,000,000	87,272,904	130,169,824	137,498,240	-		85	26	70	-	24	257,888,400	70,988,194
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000	10,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	2,000,000	-		93	40	100	-	25	4,340,000	1,700,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000	496,200,000	195,771,000	225,771,000	250,000,000	84,772,904	126,169,824	135,498,240	-		85	25	69	-	26	253,548,400	69,288,194
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,606,800	968,209,750	356,804,923	935,250,940	321,690,000	205,427,701	376,453,275	333,856,550	12,360,900		93	39	94	1	27	560,712,483	185,619,685
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,435,000	90,000,000	50,000,000	141,379,940	82,000,000	9,435,000	42,982,983	47,389,500	2,002,900		100	48	95	1	28	74,562,988	20,362,077
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139,934,000	747,340,000	85,070,223	149,500,000	84,540,000	124,094,501	76,133,639	68,850,300	10,358,000		89	10	81	7	29	241,276,845	55,887,288

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	-		--	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	30	-	-
Pemeliharaan mebel	-	1,000,000	-	-	5,000,000	-	49,820,000	-	0		-	4,982	-	-	31	1,200,000	9,964,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	15,150,000	13,050,000	19,980,000	10,000,000			9,625,000	13.050.000		-	-	74	-	32	11,636,000	1,925,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56,637,800	69,999,750	100.000.000	599,391,000	120,000,000	56,298,200	232,781,353				99	333	-	-	33	169,205,710	57,815,911
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,600,000	19,230,000	205,440,000	21,500,000	10,150,000	15,600,000	14,595,000	204,929,000	205.440.000		100	76	100	-	34	54,384,000	47,024,800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	25,490,000	3,244,700	3,500,000	10,000,000		5,545,300	3,062,750	3.244.700		-	22	94	-	35	8,446,940	1,721,610
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100,000,000									-	-	-	-	36	20,000,000	-
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		100,000,000									-	-	-	-	37	20,000,000	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		100,000,000									-	-	-	-	38	20,000,000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	714,539,100	759,075,000	1,154,990,000	834,635,000	709,670,000	699,755,667	750,950,588	1,154,451,500	1,360,000		98	99	100	0	39	834,581,820	521,303,551
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,222,503,700	749,240,000	1,154,990,000	834,635,000	679,000,000	699,755,667	741,658,088	1,154,451,500	1,360,000		31	99	100	0	40	1,128,073,740	519,445,051
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	21,225,000	25,000,000	12,000,000	18,320,000	50,000,000	21,203,000	24,373,400	11,925,000	12.000.000		100	97	99	-	41	25,309,000	11,500,280
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		241,720,000	20,000,000	14,065,000	300,000,000	216,364,517	236,895,641	19,975,000	20.000.000		-	98	100	-	42	115,157,000	94,647,032
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		478,335,000	1,122,990,000	802,250,000	249,000,000	439,818,150	476,234,047	1,122,551,500	1,360,000		-	100	100	0	43	530,515,000	407,992,739
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,201,278,700	1,587,185,500	1,817,257,877	1,101,505,000	2,317,160,800	2,146,177,075	1,554,481,719	1,738,542,492	110,395,500		97	98	96	10	44	1,804,877,575	1,109,919,357

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,899,678,700	1,567,185,500	1,677,493,477	1,068,060,000	1,975,560,800	1,875,513,175	1,536,240,719	1,610,084,992	109,285,500		99	98	96	10	45	1,637,595,695	1,026,224,877
Penyediaan Permakanan	670,229,000	636,116,370	515,800,645	435,300,000	800,000,000	668,094,385	632,731,850	490,599,230	71,179,500		100	99	95	16	46	611,489,203	372,520,993
Penyediaan Sandang	219,500,000	12,812,000	12,000,000	30,000,000	25,732,100	217,845,280	11,349,500	11,213,500	12.000.000		99	89	93	-	47	60,008,820	48,081,656
Penyediaan Alat Bantu	209,215,700	136,534,000	120,000,000	87,500,000	143,635,700	196,850,000	136,500,000	119,987,900	120.000.000		94	100	100	-	48	139,377,080	90,667,580
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60,745,000	35,505,000	34,000,000	10,905,000	60,745,000	58,305,000	27,318,000	33,239,500	2,090,000		96	77	98	19	49	40,380,000	24,190,500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	401,000,000	359,333,430	380,166,560	350,000,000	490,165,000	400,148,010	352,850,500	362,595,000	19,831,000		100	98	95	6	50	396,132,998	227,084,902
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	107,000,000	100,800,700	145,054,272	100,000,000	200,000,000	107,000,000	99,519,369	129,509,000	145.054.272		100	99	89	-	51	130,570,994	67,205,674

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	28,800,000	23,500,000	5,000,000	750,000	-	28,760,000	23,385,000	4,950,000	475,000		100	100	99	63	52	11,610,000	11,514,000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27,000,000	19,010,000	27,580,000	9,990,000	45,000,000	27,000,000	18,602,000	27,580,000	3,704,000		100	98	100	37	53	25,716,000	15,377,200
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	17,950,000	101,050,000	15,050,000	1,025,000	18,100,000	17,948,000	95,979,500	14,900,000	15.050.000		100	95	99	-	54	30,635,000	25,765,500
Pemberian Layanan Kedaruratan	43,599,000	89,180,000	69,790,000	29,120,000	115,599,000	43,527,000	89,015,000	69,100,862	6,796,000		100	100	99	23	55	69,457,600	41,687,772
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	54,150,000	30,900,000	20,070,000	5,240,000	54,150,000	53,673,000	27,940,000	15,660,000	1,680,000		99	90	78	32	56	32,902,000	19,790,600
Pemberian Layanan Rujukan	60,420,000	22,444,000	332,982,000	8,230,000	22,434,000	56,362,500	21,050,000	330,750,000	3,530,000		93	94	99	43	57	89,302,000	82,338,500
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	301,600,000	20,000,000	139,764,400	33,445,000	341,600,000	270,663,900	18,241,000	128,457,500	1,110,000		90	91	92	3	58	167,281,880	83,694,480
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5,705,000	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-		74	-	-	-	59	1,141,000	840,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemberian Layanan Kedaruratan	16,420,000	5,000,000	5,250,000	890,000	16,420,000	10,795,000	3,750,000	2,775,000	5.250.000		66	75	53	-	60	8,796,000	3,464,000
Penyediaan Permakanan	32,725,000	5,000,000	8,000,000	3,000,000	32,725,000	25,659,000	4,646,000	7,050,000	8.000.000		78	93	88	-	61	16,290,000	7,471,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	188,000,000	359,333,430	75,000,000	20,000,000	118,000,000	180,369,900		72,741,000	1,110,000		96	-	97	6	62	152,066,686	50,844,180
Penyediaan Alat Bantu	25,300,000	0	0	0	25,300,000	17,710,000	0	0	0		70	-	-	-	63	10,120,000	3,542,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	188,000,000	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	0	0		4	-	-	-	64	38,947,000	1,347,000
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4,930,000	5,000,000	0	0	4,930,000	3,430,000	4,945,000	0	0		70	-	-	-	65	2,972,000	1,675,000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kabupaten/kota	20.000.000	20,000,000	21,814,400	3,000,000	45,000,000	18.500.000	18.000.000	20,110,000	21.814.400		-	-	92	-	66	17,962,880	4,022,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4,745,000	19,010,000	24,800,000	5,190,000	4,745,000	4,725,000	18,602,000	22,125,000	24.800.000		100	98	89	-	67	11,698,000	9,090,400
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13,200,000	0	0	0	25,000,000	13,200,000	0	0	0		100	-	-	-	68	7,640,000	2,640,000
Pemberian Layanan Rujukan	3,840,000	22,444,000	4,900,000	1,365,000	23,840,000	3,840,000	21,050,000	3,656,500	4.900.000		100	94	75	-	69	11,277,800	5,709,300
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	-	70	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13,760,083,317	20,124,479,900	16,477,877,318	17,872,056,300	7,062,970,000	13,710,872,815	20,060,451,445	16,083,627,000	8,926,000		100	100	98	0	71	15,059,493,367	9,972,775,452
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		87,020,000	199,999,700	97,350,000	110,000,000		87,020,000	176,725,000	3,500,000		-	100	88	4	72	98,873,940	53,449,000
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	0	87,020,000	199,999,700	97,350,000	110,000,000	0	87,020,000	176,725,000	3,500,000		-	100	88	4	73	98,873,940	53,449,000
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13,760,083,317	1,407,863,000	16,277,877,618	17,774,706,300	6,952,970,000	13,710,872,815	19,973,431,445	15,906,902,000	5,426,000		100	1,419	98	0	74	11,234,700,047	9,919,326,452
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	496,019,200	1,308,720,000	62,330,000	60,000,000	1,450,000,000	495,849,200	1,303,347,625	61,674,000	525,000		100	100	99	1	75	675,413,840	372,279,165

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	20,037,459,900	310,000,000	78,940,000	1,000,000,000	1,154,757,491	1,399,118,500	309,692,000 ;	309.692,000		-	7	100	-	76	4,285,279,980	572,713,598
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	17,320,876,900	15,905,547,618	16,860,291,300	4,502,970,000	12,060,266,124	17,270,965,320	15,535,536,000	3,101,000		-	100	98	0	77	10,917,937,164	8,973,973,689
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0		0	0	0	1,800,000		-	-	-	0	78	155,095,000	360,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,344,272,000	1,905,011,980	571,808,978	1,362,820,000	1,950,600,000	3,118,302,925	1,874,729,000	532,832,500	75,366,000		93	98	93	6	79	1,826,902,592	1,120,246,085
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3,144,196,000	1,734,171,000	521,775,978	1,325,725,000	1,550,000,000	2,918,373,925	1,704,631,000	483,355,500	61,366,000		93	98	93	5	80	1,655,173,596	1,033,545,285
Penyediaan Makanan	2,944,120,000	249,951,000	225,000,868	225,000,000	250,000,000	169,383,800	220,706,000	220,628,000	59,466,000		6	88	98	26	81	778,814,374	134,036,760
Penyediaan Sandang	100,000,000		24,900,000	34,000,000	100,000,000	99,567,000		22,770,000	22.770.000		100	-	91	-	82	51,780,000	24,467,400
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	435,270,000	27,700,000	4,885,110	10,000,000	450,000,000	429,500,000	27,700,000	4,387,500	4.387.500		99	100	90	-	83	185,571,022	92,317,500
Pelayanan Dukungan Psikososial	2,208,850,000	1,456,520,000	266,990,000	1,056,725,000	750,000,000	2,219,923,125	1,456,225,000	235,570,000	1,900,000		101	100	88	0	84	1,147,817,000	782,723,625

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	200,076,000	170,840,980	50,033,000	37,095,000	400,600,000	199,929,000	170,098,000	49,477,000	14,000,000		100	100	99	38	85	171,728,996	86,700,800
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200,076,000	170,840,980	50,033,000	37,095,000	400,600,000	199,929,000	170,098,000	49,477,000	14,000,000		100	100	99	38	86	171,728,996	86,700,800
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860	115,270,341	25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	87	43,187,890	15,349,890
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860	115,270,341	25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	88	43,187,890	15,349,890
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860		25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	89	20,133,822	15,349,890
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											-	-	-	-	90	-	-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	42,250,000	70,000,000	100,000,000	101,475,000	1,090,000,000	42,250,000	61,439,650	97,419,200			100	88	97	-	91	280,745,000	40,221,770

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0	0	157.250.000	120.000.000	192.000.000		23,964,000	97,419,200	97.419.200		-	-	97	-	92	20,000,000	24,276,640
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15,000,000	55,000,000		68,325,000	650,000,000	15,000,000	47,095,250		0		100	86	-	-	93	157,665,000	12,419,050
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	0	0	20.000.000	22,025,000	90,000,000	50. 613.900	0		0		-	-	-	-	94	22,405,000	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		25,000,000	65.000.000	23,150,000	170,000,000		23,131,250		0		-	93	-	-	95	43,630,000	4,626,250
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15,000,000		175.000.000			15,000,000	15.000.000		0		100	-	-	-	96	3,000,000	3,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0		0	23,150,000			0		0		-	-	-	-	97	4,630,000	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	27,250,000	15,000,000	100,000,000	33,150,000	440,000,000	27,250,000	14,344,400	97,419,200	0		100	96	97	-	98	123,080,000	27,802,720
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	27,250,000	15,000,000	165,000,000	33,150,000	220,000,000	27,250,000	14,344,400		0		100	96	-	-	99	59,080,000	8,318,880
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	102,275,500	260,000,000	65,000,000	76,580,000	1,322,396,000	72,929,125	255,117,500	56,609,200	5,262,000		71	98	87	7	100	365,250,300	77,983,565
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	20,000,000	25,000,000	20,530,000	380,650,000		18,970,000	22,857,200	22,857,200		#DIV/0!	95	91	-	101	89,236,000	8,365,440
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	0		25,000,000	20,530,000	45,000,000	0	0	22,857,200	22,857,200		-	-	91	-	102	18,106,000	4,571,440

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		40,000,000	30,000,000	42,000,000	656,746,000		37,147,500	23,912,500	5,262,000		-	93	80	13	103	153,749,200	13,264,400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46,775,500		30,000,000	42,000,000		18,084,300	18.840.300	23,912,500	5,262,000		39	-	80	13	104	23,755,100	9,451,760
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,500,000	200,000,000	10,000,000	14,050,000	285,000,000	54,844,825	199,000,000	9,839,500	9.839.500		99	100	98	-	105	112,910,000	52,736,865
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			10,000,000	14,050,000	20,000,000		0	9,839,500	9.839.500		-	-	98	-	106	8,810,000	1,967,900
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	555,000,000	535,000,000	543,022,364	441,570,000	960,000,000	552,698,676	528,122,271	526,298,350	5,150,000		100	99	97	1	107	606,918,473	322,453,859

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555,000,000	535,000,000	543,022,364	441,570,000	960,000,000	552,698,676	528,122,271	526,298,350	5,150,000		100	99	97	108		606,918,473	322,453,859
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	555,000,000	525,000,000	543,022,364	441,570,000	690,000,000	552,698,776	518,879,871	526,298,350	5,150,000		100	99	97	109		550,918,473	320,605,399
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		40,000,000	10,000,000	8,585,000	776,694,430	15,000,000	34,677,000	8,665,000	17.330.000		-	87	87	-10		167,055,886	11,668,400
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	40,000,000	10,000,000	8,585,000	776,694,430	15,000,000	34,677,000	8,665,000	8.665.000		100	87	87	-11		170,055,886	11,668,400
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		20,000,000	10,000,000	8,585,000	387,694,430		17,740,000	8,665,000	8.665.000		-	89	87	-12		85,255,886	5,281,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	200,000,000	149,060,000	199,836,000	184,240,000	1,195,951,269	198,913,900	147,319,874	197,410,450	3,805,000		99	99	99	2	113	385,817,454	109,489,845
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	160,000,000	109,060,000	184,836,000	169,240,000	781,951,269	159,234,000	107,891,874	182,772,800	3,805,000		100	99	99	2	114	281,017,454	90,740,735
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140,000,000	60,000,000	184,836,000	169,240,000	392,951,269	139,240,000	59,317,374	182,772,800	3,805,000		99	99	99	2	115	189,405,454	77,027,035
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	414,000,000	39,679,900	39,428,000	14,637,650	0		99	99	98	-	116	104,800,000	18,749,110
koordinasi sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	34,500,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	414,000,000	34,400,000	39,428,000	14,637,650	0		100	-	-	-	117	6,900,000	6,880,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	103,480,419	40.000,000	15.000.000	15.000.000	305,044,000	57,910,260	39,4228.000	15.000.000	14.637.650		56	-	-	-	118	81,704,884	11,582,052
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	379,000,000	39,679,900	39,428,000	15,000,000	14.637.650		99	99	100	-	119	97,800,000	18,821,580
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	137,980,419	36,703,000	59,999,728		945,500,578	92,310,260	23,924,200	59,999,728	1,260,000		67	65	100	-	120	236,036,745	35,498,838
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.480.419	16,703,000	59,999,728	54,795,000	316,557,441	57.910.260	9,469,200	59,999,728	55.725.100		#DIV/0!	57	100	2	121	89,611,034	14,145,786
Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	103,480,419	16.703.000	175.085.000	165.063.000	305,044,000	57,910,260	9,469.200	14.455.000	55.725.100		56	-	-	-	122	81,704,884	11,582,052

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Advokasi kebijakan dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	85,661,948,196	0	59,999,728	54,795,000		0	0	59,999,728	1,260,000		-	-	100	2	123	17,155,348,585	12,251,946
											-	-	-	-	124	-	-

Keterangan:

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya | 12 | Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun |
| 2 | Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun | 13 | Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun |
| 3 | Anggaran tahun kedua renstra disusun | 14 | Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun |
| 4 | Anggaran tahun ketiga renstra disusun | 15 | Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun |
| 5 | Anggaran tahun keempat renstra disusun | 16 | Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun |
| 6 | Anggaran tahun elima renstra disusun | 17 | Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6 |
| 7 | Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun | 18 | Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11 |
| 8 | Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun | | |
| 9 | Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun | | |
| 10 | Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun | | |
| 11 | Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun | | |

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Target Tahun N

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N} - \text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

Anggaran/Realisasi Tahun N-1

c. Kelompok sasaran pelayanan Dinsos P2PA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinsos P2PA Kabupaten Demak menetapkan sejumlah kelompok sasaran utama yang menjadi prioritas pelayanan. Kelompok sasaran ini merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat ketentuan social dan ekonomi tinggi serta memerlukan perlindungan dan pemberdayaan secara khusus dari pemerintah daerah. Adapun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan Dinsos P2PA adalah :

1. Kelompok Keluarga Pra- sejahtera dan miskin .

Kelompok ini merupakan penerima utama program bantuan social seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan darurat saat terjadi bencana. Kelompok ini masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan pemerintah.

2. Kelompok anak terlantar, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dari keluarga miskin dan rentan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya perlindungan dan pengembangan potensi anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

3. Kelompok perempuan, terutama yang berada dalam situasi rentan, juga menjadi kelompok sasaran utama. Termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA), perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, serta perempuan yang terdampak bencana dan kemiskinan. Perempuan penyandang disabilitas juga mendapatkan perhatian dalam rangka pemenuhan hak – hak dasar perlindungan social mereka.

4. Kelompok Penyandang disabilitas , baik fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, yang membutuhkan akses terhadap layanan social yang inklusif dan ramah disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan intervensi khusus kepada penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak semakin termarginalkan.

5. Kelompok lansia atau lanjut usia, khususnya lansia terlantar dan miskin menjadi sasaran pelayanan dalam bentuk bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelayanan perawatn. Lansia tanpa keluarga atau yang hidup sendiri juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka diusia senja.

6. Kelompok korban kekerasan dan perdagangan orang, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kelompok ini

membutuhkan penanganan yang komprehensif, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum hingga reintegrasi sosial.

7. Kelompok pekerja sosial, relawan dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) sebagai mitra kerja juga menjadi sasaran dalam bentuk pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan kapasitas. Peran mereka sangat strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial di masyarakat.
8. Kelompok masyarakat yg terdampak permasalahan sosial, bencana alam dan bencana sosial .

d. Mitra Dinas Sosial P2PA dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , bekerja sama dengan mitra strategis baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.

1. Mitra Pemerintah

Dinas Sosial P2PA bersinergi dengan lembaga – lembaga pemerintah lain untuk memastikan koordinasi program berjalan lancar, diantaranya yaitu :

- a. Dinas Pendidikan : untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak – anak dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan non formal.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : terutama dalam pencatatan identitas anak dan perempuan korban kekerasan dan penerbitan dokumen darurat (akta lahir, KTP, KK) bagi korban bencana.
- c. Kepolisian dan Kejaksaan : sebagai mitra dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
- d. Baperida : dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak.
- e. Dinas Kesehatan : dalam program kesehatan ibu dan anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai mitra bersinergi dalam menangani aspek social kemanusiaan saat dan pascabencana .
- g. BPBD sebagai mitra untuk koordinasi logistic korban bencana alam .
- h. Dinkes sebagai mitra untuk penanganan gizi buruk , pemeriksaan kesehatan , ibu hamil dan layanan trauma healing.
- i. Dinputaru sebagai mitra untuk pembuatan fasilitas umum seperti MCK terpisah dan ruang laktasi darurat di lokasi pengungsian.

- j. Satpol PP sebagai mitra pengamanan pengungsian dan pendampingan evakuasi kelompok rentan.

2. Mitra Lembaga Non – Pemerintah dan LSM

Dinas Sosial, P2PA juga bekerja sama dengan LSM local dan nasional seperti LBH Apik, Yayasan Setara Semarang , PMI, LKS/LKSA atau organisasi masyarakat sipil lain yang aktif dalam isu perempuan dan anak. Organisasi keagamaan dan komunitas lokal yang mendukung upaya penyuluhan, advokasi dan pendampingan korban.

3. Mitra Dunia Usaha dan CSR

Dinas Sosial, P2PA juga bekerja sama dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan , pelatihan keterampilan dan bantuan sosial., Kolaborasi dengan UMKM dan koperasi perempuan.

4. Forum dan Jejaring Masyarakat

- Forum Anak Demak (FADEM) sebagai wadah partisipasi anak
- Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai jejaring masyarakat.
- Relawan Sosial dan Tagana (Taruna Siaga Bencana) sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan respon bencana sosial.

Dengan melibatkan berbagai mitra, Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak mampu melaksanakan tugas – tugasnya secara lebih efektif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat perlindungan sosial serta pemberdayaan yang inklusif, responsive gender dan berbasis hak anak.

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinsos P2PA

Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Demak secara konsisten menjalin kemitraan dengan Dinsos P2PA melalui berbagai bentuk kolaborasi diantaranya :

1. Pendanaan dan sponsor Program sosial

BUMD memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan sosial seperti bantuan sembako, santunan anak yatim dan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini membantu memperluas jangkauan program Dinsos P2PA hingga ke lapisan masyarakat rentan , seperti Bank Djawa Tengah, BKK, LKM Sejahtera, DSS (Demak Sarana Sehat) , APSAI

2. Pemberdayaan perempuan dan UMKM

Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial P2PA, BUMD turut mendukung pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan untuk perempuan kepala keluarga dan korban kekerasan guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (seperti Bank Djawa Tengah, BKK, LKM Sejahtera, DSS (Demak Sarana Sehat), APSAI).

Dampak dari sinergi ini terlihat dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, P2PA, antara lain penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan jumlah perempuan pelaku usaha produksi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program perlindungan sosial.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial P2PA

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan kerja sama antar daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dinas Sosial P2PA telah melaksanakan berbagai bentuk kerja sama daerah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, efisiensi penanganan kasus, serta perluasan cakupan sasaran intervensi sosial lintas wilayah, adapun bentuk – bentuk kerja sama tersebut antara lain :

1. Penanganan masalah sosial lintas wilayah.

Dinas Sosial P2PA bekerja sama dengan Dinas Sosial dari Kabupaten / Kota tetangga seperti Kabupaten Kudus, Jepara, Grobogan dan Kota Semarang dalam menangani permasalahan sosial yang melibatkan warga luar daerah. Fokus kerja sama ini meliputi pemulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penanganan anak terlantar, ODGJ, serta koordinasi bantuan dan rehabilitasi sosial.

2. Kerja sama perlindungan perempuan dan anak.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan warga lintas daerah, Dinsos P2PA menjalin kerja sama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta P2TP2A dari berbagai Kabupaten / Kota. Kegiatan ini mencakup koordinasi layanan, rujukan korban dan penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.

3. Kolaborasi Program penanggulangan kemiskinan

Dinas Sosial P2PA turut berpartisipasi aktif dalam forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah dan wilayah regional. Tujuan dari kerja sama ini adalah menyinergikan program – program intervensi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas wilayah administratif.

4. Pertukaran dan Integrasi Data Sosial

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, DINSOS P2PA menjalin kerja sama dalam hal pertukaran dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemerintah daerah lain. Hal ini dilakukan khususnya dalam menangani warga rentan yang berdomisili atau berpindah antar wilayah.

5. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Sosial

Kerja sama daerah juga mencakup pelaksanaan pelatihan, workshop dan bimbingan teknis secara lintas kabupaten / kota dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan sosial, termasuk penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan serta manajemen penanganan kasus.

Melalui berbagai bentuk kerja sama daerah ini, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak berupaya menciptakan sinergi yang kuat antarwilayah guna memperkuat system perlindungan sosial yang adaptif dan responsive terhadap dinamika permasalahan sosial masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan menjadi salah satu pilar penting dalam pencapaian target pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan gender dan ramah anak.

g. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P2PA, Kabupaten Demak merupakan refleksi dari upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial yang lebih tepat guna, merata dan berorientasi pada keadilan sosial. Inovasi yang tidak lagi aktif bukan berarti gagal, melainkan telah mengalami integrasi , efisiensi atau adaptasi ke dalam model layanan yang lebih baik sesuai kebutuhan terkini.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial P2pa sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki resiko masuk ke dalam kemiskinan ;

- 1.2. Akurasi dan kelengkapan data pada program – program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal;
 - 1.3. Kurangnya keterkaitan PPKS dengan kelompok miskin dan rentan yang harusnya mendapatkan penangan yang komprehensif ;
 - 1.4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara sosial ;
 - 1.5. Masih adanya penduduk miskin dan rentan dalam DTKS yang belum padan NIK nya sehingga perlu dilakukan pemutakhiran ;
 - 1.6. Kurangnya akses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan untuk kelompok rentan dan miskin;
 - 1.7. Kurangnya standarisasi SDM khususnya pendampingan sosial dan relawan sosial ;
 - 1.8. Adanya masyarakat yg seharusnya membutuhkan bantuan tetapi tidak masuk atau tidak memperoleh bantuan sosial .
 - 1.9. Adanya masyarakat yg seharusnya tidak membutuhkan bantuan tetapi masuk atau memperoleh bantuan sosial
-
2. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan ;
 - 2.2. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan ;
 - 2.3. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
 - 2.4. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
 - 2.5. Kelompok kerja PUG di Kabupaten belum optimal ;
 - 2.6. Kurangnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender ;
 - 2.7. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses – proses pengambilan keputusan ;
 - 2.8. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual ;
 - 2.9. Pengungkapan kasus- kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga ;
 - 2.10 Tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Demak .

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja Perangkat Daerah. Peluang bagi Dinas Sosial P2PA dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

1. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Meningkatkan kualitas Data sasaran dengan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi secara berkala;
 - 1.2. Mengembangkan Data sasaran meliputi data PPKS, data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, Data PSKS termasuk didalamnya data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Panti, dan balai kesejahteraan sosial;
 - 1.3. Sinergitas dan Koordinasi kelembagaan antar OPD harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 1.4. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 1.5. Pendampingan sosial oleh pekerja sosial melalui kegiatan pencegahan, respon kasus, management kasus serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara optimal;
 - 1.6. Dukungan teknis melalui penyusunan regulasi, sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan atau peningkatan aktivitas;
 - 1.7. Dukungan aksesibilitas melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung didukung oleh kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (uptd) berupa panti – panti sosial untuk melaksanakan tugas rehabilitasi sosial bagi PPKS;
 - 1.8. Adanya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - 1.9. Pelaksanaan kebijakan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;
2. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
 - 2.2. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;

- 2.3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 2.4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- 2.5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 2.6. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- 2.7. Adanya komitmen dan kerjasama antara lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- 2.8. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus – kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- 2.9. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial P2PA

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **”Keterpaduan penanganan PMKS/PPKS dalam penanggulangan kemiskinan ”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Permasalahan dirumuskan dari data-data pada subbab sebelumnya, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, dan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan disajikan secara ringkas tanpa menyajikan data yang berlebih dan berpotensi duplikasi dengan data di subbab sebelumnya. Permasalahan dapat disintesis melalui metode penyusunan pohon masalah.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Sosial P2PA yaitu: **”Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak ”**, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Keterpaduan penanganan PMKS/PPKS dalam penanggulangan kemiskinan”
“Peningkatkan Kesenjaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Urusan Sosial Pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang	1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial 2. Kurangnya tenaga professional sosial 3. Minimya anggaran khusus untuk rehabilitasi sosial 4. Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan lintas daerah 5. Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat
2	Belum menyeluruhnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS	1. Masih terdapat PMKS/PPKS yg belum terdata atau belum masuk dalam DTKS maupun Siks DJ
		2. Keterbatasan Jaminan sosial bagi kelompok kusus/rentan
		3. Keterbatasan anggaran dan prioritas program
		4. Kurang optimalnya koordinasi lintas

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		sektor
		5. Rendahnya literasi sosial masyarakat
	Urusan P2PA	
1	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1. Kurangnya partisipasi aktif perempuan di ranah public, termasuk dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan.
		2. Kurangnya representasi perempuan di lembaga pengambil keputusan
		3. Minimnya dukungan kebijakan dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
		4. Rendahnya kemandirian ekonomi perempuan.
2	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Masih kuatnya budaya patriaki dan normalisasi kekerasan
		2. Rendahnya literasi dan kesadaran hukum masyarakat
		3. Belum optimalnya layanan perlindungan dan pendampingan korban
		4. Kurangnya SDM terlatih dan terintegrasi
		5. Minimnya pencegahan berbasis komunitas.
3	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	1. Masih rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak anak.
		2.Terbatasnya fasilitas dan layanan ramah anak .
		3. Kurangnya ketersediaan data anak secara terpadu
		4. Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait
		5. Keterbatasan anggaran khusus untuk program perlindungan dan pemenuhan hak anak

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Sosial, P2PA dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1. Keterpaduan Penanganan PMKS/PPKS dalam Penanggulangan Kemiskinan
- 2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

5.1. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini juga dijelaskan program-program dalam RPJMN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian Sosial RI yang mendukung visi dan misi Presiden khususnya bidang sosial. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia, selama 5 (lima) tahun kedepan “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong “

Visi kementerian Sosial ini merupakan turunan langsung dari visi nasional yang dijabarkan melalui Asta Cita, khususnya pada poin – poin berikut :

1. Asta Cita ke 4
 - Memperkuat pembangunan SDM, kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
 - Indikatif program Kemensos : peningkatan kualitas SDM pengelola sosial, perluasan perlindungan difabel.
2. Asta Cita ke 6
 - Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sejak dari desa.
 - Indikatif program kemensos : penggunaan basis data terpadu, PKH, program lanjut usia, serta perbaikan panti sosial.

Sasaran Utama Renstra Kemensos RI :

1. Penuntasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan tepat sasaran ;
2. Peningkatan efektivitas dan efisien penyaluran bantuan sosial
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan
4. Pemerataan akses layanan sosial di desa/kelurahan
5. Rehabilitasi sosial yang berkualitas dan memenuhi SPM
6. Perlindungan sosial adaptif terhadap bencana dan krisis sosial.
7. Modernisasi tata kelola public dan transformasi digital layanan sosial.

5.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang mendukung pembangunan Kabupaten

Demak, maka program dari Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Kabupaten Demak adalah dalam pelaksanaan pembangunan perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk manusia baik laki-laki maupun perempuan. Renstra Kemen PPPA 2025 -2029 mengangkat isu penting yaitu Kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan , dan implementasi system satu data perempuan dan anak.

Rencana Kerja Kemen PPPA 2025 – 2029 menitikberatkan pada 19 fokus prioritas utama, antara lain :

1. Penguatan regulasi teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
2. Pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
3. Pengembangan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Manajemen Online) untuk manajemen kasus dan data .
4. Percepatan PUG di kementerian / lembaga.
5. Pendanaan Dak fisik dan Non Fisik PPA di daerah.
6. Koordinasi strategis dalam berbagai regulasi dan program prioritas seperti :
 - Kesejahteraan Ibu dan anak 1000 Hari Pasca Kelahiran (HPK)
 - Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS, KDRT, TPPO)
 - Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

5.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah . adalah :

1. Menjadi acuan arah program dan kegiatan selama 2025 – 2029
2. Menetapkan ukuran keberhasilan layanan social.
3. Membangun sinergi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
4. Membangun layanan dasar, data DTKS dan mitigasi bencana
5. Menegakkan kemandirian melalui kegiatan produktif dan jaminan sosial.
6. Mengoptimalkan tata kelola dan akurasi data sosial.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah . Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat kemiskinan dari kisaran 9,00 – 9,66 % pada tahun 2025 menjadi 7,25 – 7,90 pada tahun 2029.
2. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan dari sebesar 39,97 % di tahun 2025 menjadi 48,05 % di tahun 2029.
3. Meningkatkan persentase penyandang disabilitas bekerja di sector formal dari 20 % ke 27 % pada tahun 2029.

5.5. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah

Mengintegrasikan urusan PPPA dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) sebagai isu strategis dalam RPJMD, sejalan dengan RPJMN dan prioritas nasional. Ditekan Pengarusutamaan gender (PUG) , pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar didukung pendanaan (DAK Fisik & Nonfisik).

Tujuan Renstra Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah adalah :

- Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
- Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Meningkatnya peran perempuan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan
- Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial P2PA . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial P2PA dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial P2PA dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Sosial P2PA dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak untuk kawasan pertanian berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
NIHIL					

5.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Sosial P2PA adalah terkait Isu Stretegis Pilar Sosial

Tabel 3.2

Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah. Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pilar Sosial	
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun	Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah menurun dan masih dibawah target.
	2.Masih kurangnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
	3.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurun
Pilar Ekonomi	
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Pilar Hukum	
Tujuan 16	1. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua tingkatan	anak laki-laki dan perempuan.
	2.Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum mencapai target nasional

Tabel 3.3
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 Dinas Sosial P2PA

Pilar Sosial

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017		Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	79.77	83.81	87.86	91.91	95.95	Meningkat menjadi 17,12%	-	Integrasi Hak disabilitas dalam dokumen perencanaan
1.3.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun menjadi 2,8 juta 5	--	Perbaikan dan pemutakhiran DTKS
5.1.1	Jumlah kebijakan yg responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5	6	7	8	Meningkat banyak 16 dokumen	-	Integrasi PUG dalam dokumen perencanaan daerah.
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	-	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pencegahan Kekerasan Peningkatan akses terhadap layanan perlindungan terpadu

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.								
5.2.1	Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,44	0	0	0	0	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dan keluarga .
5.2.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yg mendapat layanan komprehensif	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 70 %		Penguatan Sistem Layanan Terpadu, Peningkatan Regulasi dan SOP Layanan Komprehensif, Penguatan Sumber Daya Manusia & Jejaring Layanan. Penguatan Pelaporan & Sistem Informasi
5.5.1	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat , parelemen daerah dan pemerintah daerah	10	11	13	14	16	Meningkat menjadi 17 %		Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmasi Gender. Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Pemimpin. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Kampanye Publik
5.5.2	Proporsi perempuan yg berada di posisi managerial	55.3	61.75	68.2	74.65	81.1	Meningkat		- Penguatan Kebijakan Afirmasi Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan. - Peningkatan Kapasitas Perempuan Menuju Kepemimpinan. - Mendorong Kesetaraan Gender di Dunia Usaha dan UMKM. - Monitoring dan Pelaporan Keterwakilan Perempuan. - Kampanye Kesadaran Gender dalam Kepemimpinan

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Pilar Ekonomi

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Proporsi penduduk yg hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun	-	Pemetaan Data Kemiskinan Multidimensi yang Terdisagregasi
								-	Penguatan Program Perlindungan Sosial Inklusif

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Pilar Hukum

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
16.2.1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yg mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologi dari pengasuh dalam setahun terakhir	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun	-	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Penyandang Disabilitas
								-	Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur Inklusif
16.2.1	Prevelansi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	0.08%	0.06%	0.05%	0.03%	0.02%	Menurun	-	Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat.
								-	Penanganan & Pemulihan Korban Kekerasan Anak.
								-	Penguatan Data & Pelaporan Kasus Kekerasan Anak
16.7.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan	13	14	15	16	17	Meningkat	-	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmasi

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
	Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)							- Gender. - Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan Perempuan - Calon Legislatif. - Kampanye Kesadaran dan Dukungan Publik. - Kemitraan dengan Parpol dan Organisasi Masyarakat Sipil.	
16.7.1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (esl I dan II)	5	5	5	5	5	Meningkat	- Penguatan Kebijakan Afirmasi dan Regulasi Internal. - Pengembangan Kapasitas dan Leadership. - Pemantauan dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan	

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

5.8. Telaahan Dokumen Lainnya .

- Rencana Aksi (Renaksi) Dinas sosial P2PA Kabupaten Demak tahun 2023 – 2024.

Isi utama : Renaksi berisi program dan kegiatan prioritas dalam dua tahun sebagai implementasi Renstra periode sebelumnya .

Telaahan :

- Banyak program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yg sudah berjalan, namun perlu peningkatan kualitas dan jangkauan.
- Terdapat kebutuhan penguatan kapasita SDM dan sarana – prasarana layanan sosial.
- Sinkronisasi program dengan kebijakan provinsi dan pusat masih perlu ditingkatkan.

- Rencana Induk (Rinduk) Pembangunan Kabupaten Demak 2020 – 2040.

Isi utama : Rinduk merupakan dokumen strategis jangka panjang yang mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh , termasuk bidang sosial dan pemberdayaan.

Telaahan :

- Rinduk menegaskan pentingnya penguatan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar pembangunan inklusif.
- Dokumen ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sector dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

- Roadmap Pengarusutamaan Gender Kabupaten Demak 2023 – 2028

Isi Utama : Roadmap ini menguraikan langkah –langkah strategis untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai sector pembangunan.

Telaahan :

- Roadmap menekankan target peningkatan keterwakilan perempuan , pencegahan kekeasan berbasis gender dan akses layanan sosial yang ramah gender.
- Menyediakan kerangka monitoring dan evaluasi yang bias diadopsi Dinas Sosial P2PA.

- Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 – 2029.

Isi Utama : RAN ini menjadi pedoman nasional dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Telaahan :

- RAN menyediakan standar pelayanan dan target capaian yang perlu dijadikan acuan daerah.
- Ada penekanan pada penguatan layanan perlindungan anak, penanganan kekerasan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

- Dokumetasi Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2025-2029.

Isi Utama : Dokumen Renstra Kemen PPA menetapkan arah kebijakan nasional , prioritas program dan target kinerja.

Telaahan :

- Renstra kemen PPA mengarahkan penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis hak dan inklusi nasional.
- Menyediakan framework penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat.

5.9. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dinas Sosial P2PA secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan **misi ke 5 Memperkuat Ketahanan Sosial Dan Lingkungan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan pada tujuan Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman, dan sasaran 1. Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas sasaran 2. Mewujudkan keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang dan Indikator yang diampu Dinas Sosial P2PA adalah Tingkat kemiskinan.**

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial P2PA yaitu :

1. Demak Tangguh dan Lestari .
 - Pengentasan kemiskinan melalui peningkata akses layanan dasar yaitu perluasan jangkauan bantuan sosial inklusif (PKH, BPNT, BSTD) untuk perempuan rentan , lansia terlanter , disabilitas dan anak – anak rentan.
 - Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan yaitu peran Dinas Sosial P2PA dalam pemberdayaan perempuan rentan, korban KDRT, lansia dan disabilitas melalui pelatihan dan akses modal.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial P2PA

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia , Renstra Dinas Sosial P2PA Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial P2PA sebagai berikut

Tabel 3.4
Isu Perangkat Daerah
Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHSyang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Kemiskinan dan kesempatan kerja Pengentasan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesempatan kerja dengan Memperkuat akses lapangan kerja dan program pemberdayaan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem serta memulihkan stabilitas ekonomi masyarakat.	1. Meningkatnya Kemandirian PPKS	Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Kemiskinan	kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kemiskinan dan Kesempatan Kerja
	2. Mengurangi Ketimpangan Gender	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah menurun dan masih di bawah target	Gender	rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Meningkatkan pembangunan gender

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHSyang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
				dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi		

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial P2PA untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan satu , Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

PPKS mencakup individu , keluarga , kelompok atau komunitas yang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti lansia terlantar , penyandang disabilitas , anak terlantar, perempuan korban kekerasan dan kelompok rentan lainnya. Dinas Sosial P2PA berkomitmen meningkatkan akses pelayanan sosial yang komprehensif , partisipatif dan berkelanjutan melalui berbagai program seperti rehabilitasi sosial , pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan diatas diperlukan sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan PPKS

2 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Sosial P2PA.

2. Tujuan dua , Mengurangi Ketimpangan Gender.

Ketimpangan gender masih menjadi permasalahan yang nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat, baik dalam aspek akses terhadap pendidikan, kesehatan , ekonomi, pengambilan keputusan, hingga perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berbasis gender. Untuk itu pengurangan ketimpangan gender menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial P2PA dengan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai pendekatan strategis lintas sektor. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sasaran yaitu :

Sasaran : 3. Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

4. Meningkatkan Pembangunan Gender.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial P2PA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	Meningkatkan Kemandirian PPKS		Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	%	1,67	1,52	1,6	1,68	1,76	1,84	1,92		
		Meningkatnya layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	%	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97		
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	angka	4,18	4,19	4,20	4,21	4,41	4,51	4,51		
			Nilai SAKIP Dinas Sosial P2PA	angka	78,80	78,84	78,85	78,87	78,90	78,95	78,99		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	Mengurangi Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,326	0,323-0,317	0,320-0,304	0,321-0,293	0,319-0,282	0,317-0,271	0,315-0,260	
		Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	684,56	600-700	700-800	700-800	800-900	800-900	900-1000	
		Meningkatkan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	angka	91,25	91,25	91,26	91,27	91,28	91,29	91,3	

3.2. Setrategi dan arah kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, P2PA mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien, Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi, Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi,

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan, Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial P2PA dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada, Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan, Strategi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Peningkatan Pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif,
2. Peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,

Tabel 3.2.

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yg adaptif dan integratif	- Peningkatan Pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative	- Pemantapan pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative	- Percepatan pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative	- Perwujudan pemerataan perlindungan sosial pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integrative
- Pengembangan peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,	- Peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,	- Pemantapan peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,	- Percepatan peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,	- Perwujudan peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah,
-				

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial P2PA agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan, Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial P2PA merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap, Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu, Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial P2PA ,

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Sosial P2PA Tahun 2025-2029

No,	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
1,	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	• Peningkatan pendapatan Masyarakat miskin melalui peningkatan akses permodalan, kesempatan kerja dan berusaha, kapabilitas SDM, investasi dan produktivitas sektor unggulan • Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga • Mengurangi kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok pendudukrentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, dan mengurangi risiko bencana • Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan satu data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengetasan kemiskinan,	• Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial • Pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan PMKS dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) • Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pelayanan kesejahteraan sosial • Penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder • Pengeembangan inovasi program sosial yang berkelanjutan • Peningkatan koordinasi antar instansi dan unit terkait dalam penanganan masalah sosial • Membangun kesadaran sosial, modal sosial dan rasa kepercayaan masyarakat	
	Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam	• Peningkatan Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak • Fasilitasi dan pemberian advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap	

2,		pembangunan	perempuan dan anak • Penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak	
3,	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis digital	• Penguatan kelembagaan yang efektif • Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko • Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset dan risiko • Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan Manajemen talenta secara efektif dan efisien • Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat(open government) • Peningkatan kualitas kebijakan berbasis satu data indonesia	• Peningkatan Perencanaan Kinerja yang baik • Penguatan Pelaporan dan evaluasi kinerja sesuai dengan sumber data yang akurat • Peningkatan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi publik • Peningkatan Kompetensi ASN yang berkualitas dengan mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsinya • Peningkatan kanal aduan dan tindaklanjut yang cepat dan akurat • Peningkatan pengelolaan kearsipan melalui nilai hasil pengawasan yang tinggi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial P2PA

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif, Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029,

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial P2PA untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu,

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Sosial P2PA mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Demak cerdas dan berkarakter dan Demak Tangguh dan Lestari , Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan
Terdiri dari Kegiatan Prioritas :
 - a. Pemberian bantuan permakanan bagi kelompok rentan, (WRSE, pemulung dan korban tindak kekerasan)
 - b. Pemberian bantuan alat bantu bagi kelompok rentan (Kursi roda bagi WRSE)
 - c. Pemberian alat bantu bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar,
 - d. Pemberian permakanan bagi anak terlantar, lansia terlantar, dan Disabilitas terlantar
 - e. Pemberian UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi Disabilitas terlantar,

- f. pemberian bantuan sembako kepada anak terlantar yg berada di dalam panti
 - g. Pemberian bantuan bagi anak stunting berupa susu stunting
 - h. pemberian bantuan sembako kepada anak terlantar yg berada di dalam panti
2. Pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan
- Terdiri dari Kegiatan Prioritas :
- 1. Pemberian pelatihan dan bantuan bagi kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan
 - 2. Pengembangan Kapasitas Perempuan

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4,1

Tabel 4.1

Dukungan Program Prioritas Dinas Sosial P2PA Terhadap Program Prioritas Bupati Tahun 2025-2030

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
PP 1	Demak Cerdas dan Berkarakter															
KP 8	Gerakan “Demak Aktif” – Pemberdayaan Pemuda & Perempuan															
AP 2	Pengembangan kapasitas perempuan	jumlah perempuan yang ditingkatkan kapasitasnya	perempuan		-	-	150	200000000	100	1000000000	-	-	100	100000000		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
AP 4	Festival & Apresiasi Karya Perempuan	jumlah event karya dan perempuan yang terselenggara “Women Impact Day”	event	-	1	200000000	1	200000000	1	150000000	1	100000000	1	200000000	2,08,04	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
PP 6	Demak Tangguh dan Lestari															
KP 1	Pengentasan kemiskinan melalui akses layanan dasar terintegrasi															
AP 3	Pemenuhan jaminan kesehatan dan Jaminan Tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja rentan yg mendapat pembiayaan n jaminan ketenagakerjaan dari	orang	12000	6700	1.423.000.000	6700	1.423.000.000	6700	1.423.000.000	6700	1.423.000.000	6700	1.423.000.000	1.06.5	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
		APBD														
KP 2	Perlindungan & Pemberdayaan Kelompok Rentan & Marginal	jumlah Kelompok Rentan & Marginal yang mendapatkan bantuan	orang	131			92		92		92		92			
AP 1	1, Bantuan Alat Bantu & Aksesibilitas untuk Disabilitas	Jumlah disabilitas yang mendapat bantuan	orang	35	-	-	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	1,06,04	Penyediaan Alat Bantu
AP 2	2, Bantuan Sosial & Pendampingan Lansia dan ODGJ	Jumlah lansia didampingi (Home visit) dan mendapat bantuan	orang	90	-	-	66	50,000,000	66	50,000,000	66	50,000,000	66	50,000,000	1,06,04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
AP 3	Layanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan & Anak	Jumlah layanan aktif yang diberikan	layanan	3		-	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	1,06,04	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota
				3			3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	3	25,000,000	1,06,04	-layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota

4,1,2, Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Sosial P2PA melaksanakan urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial , Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah, Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900,1,15,5,3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Tabel. 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

2025-12-29

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				26.735.884.049		26.837.236.103		26.494.201.577		26.451.786.907		27.166.466.008		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				26.735.884.049		26.837.236.103		26.494.201.577		26.451.786.907		27.166.466.008		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.604.877.749		8.632.944.803		8.289.910.277		7.987.495.607		8.483.940.699	
	Meningkatnya kepuasan layanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)Dinas Sosial P2PA (Dengan Satuan:%)	89.00	89.03	89.04		89.05		89.06		89.07		89.08		Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Tersusunnya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Program
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Program
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program
1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Program

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Program
	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub Bagian Program
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.105.421.749		6.159.172.093		6.213.459.840		6.268.290.666		6.323.669.699	
	Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.375.034.398		5.428.784.742		5.483.072.489		5.537.903.315		5.593.282.348	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	27	36	36		36		36		36		36		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					730.387.351		730.387.351		730.387.351		730.387.351		730.387.351	Kepala Sub Bagian Keuangan
	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	25	25	25		25		25		25		25		Kepala Sub Bagian Keuangan
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	
	Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					325.000.000		337.000.000		348.000.000		185.000.000		370.000.000	
	Terlaksananya layanan Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial P2PA	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					80.000.000		82.000.000		83.000.000		40.000.000		85.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	80	80	80		80		80		80		80		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					240.000.000		250.000.000		260.000.000		140.000.000		280.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	80	80	80		80		80		80		80		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	15	25	25		25		25		25		25		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					450.000.000		488.000.000		523.000.000		367.000.000		564.000.000	
	Terlaksananya layanan administrasi Umum	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7	7	7		7		7		7		7		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100.000.000		105.000.000		107.000.000		108.000.000		110.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	20	20		20		25		25		25		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					40.000.000		42.000.000		44.000.000		46.000.000		50.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	25	25		25		25		25		25		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					30.000.000		40.000.000		50.000.000		20.000.000		60.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu					20.000.000		20.000.000		20.000.000		10.000.000		20.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					200.000.000		210.000.000		220.000.000		130.000.000		230.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					20.000.000		30.000.000		40.000.000		10.000.000		50.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					505.000.000		538.501.710		523.820.563		477.066.059		688.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	25	28	28		28		28		28		28		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					245.000.000		246.501.710		214.820.563		211.066.059		405.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Tata Usaha

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel					30.000.000		32.000.000		33.000.000		34.000.000		35.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					40.000.000		45.000.000		46.000.000		47.000.000		48.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					150.000.000		155.000.000		160.000.000		165.000.000		170.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	10	10		10		10		10		10		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					40.000.000		60.000.000		70.000.000		20.000.000		30.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					227.771.000		227.771.000		227.771.000		227.771.000		227.771.000	
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	2		2		2		2		2		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					225.771.000		225.771.000		225.771.000		225.771.000		225.771.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					951.685.000		842.500.000		413.858.874		422.367.882		270.500.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD	persentase BMD yang terpelihara (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					82.000.000		82.000.000		82.000.000		82.000.000		82.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1		1		1		1		1		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					84.500.000		84.500.000		84.500.000		84.500.000		84.500.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	26	26	26		26		26		26		26		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					34.870.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	10	10		15		15		15		15		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					713.815.000		600.000.000		170.358.874		177.867.882		25.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	7	7	7		7		7		7		7		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					21.500.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	20	20	20		20		20		20		20		Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	5	5	5		5		5		5		5		Kepala Sub Bagian Tata Usaha
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					840.000.000		842.000.000		843.000.000		1.094.000.000		845.000.000	
	Meingkatkan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					840.000.000		842.000.000		843.000.000		1.094.000.000		845.000.000	
	Terlaksananya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	60	60		60		60		60		60		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	150	150	150		150		150		150		150		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					750.000.000		750.000.000		750.000.000		1.000.000.000		750.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	23	14	22		23		24		25		25		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	75		80		85		90		95		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	14	14		14		14		14		14		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Dengan Satuan:Orang)	0	0	10		10		10		10		10		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (Dengan Satuan:orang)	0	0	30		30		30		30		30		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi D a n S u m b e r Kesejahteraan Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.391.715.000		1.398.000.000		1.405.000.000		1.412.000.000		1.184.000.000	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					1.120.000.000		1.128.000.000		1.135.000.000		1.142.000.000		914.000.000	
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah PM Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	4341	4341	4491		3140		3340		3340		3340		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan					755.000.000		756.000.000		757.000.000		758.000.000		524.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	1070	2500	2500		1200		1400		1400		1400		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang					22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000		26.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	520	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu					153.000.000		154.000.000		155.000.000		156.000.000		157.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	110	65	65		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	65	120		120		120		120		120		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					30.000.000		32.000.000		34.000.000		36.000.000		38.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	370	180	180		710		710		710		710		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat					40.000.000		41.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100	60		240		240		240		240		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	75	80	80		80		80		80		80		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	60	60		80		80		80		80		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	200	200		200		200		200		200		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan					20.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		25.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	80	48	48		48		48		48		48		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100	140		150		150		150		150		Kelompok Subtansi Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Orang)	35	100	35		35		35		35		35		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					271.715.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	
	Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	449	450	450		450		450		450		450		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	48	48	48		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	48	48	48		48		48		48		48		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		40		40		40		40		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	10	10		20		20		20		20		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	48	48		20		20		20		20		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	45	45	45		80		80		80		80		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	11	13	13		60		60		60		60		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak					4.930.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					4.745.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	50	50		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					33.200.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	30	30		30		30		30		30		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan					23.840.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	30	30	30		30		30		30		30		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					15.005.531.300		15.020.291.300		15.010.291.300		15.010.291.300		15.188.525.309	
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	65,59	67,47	71,65		71,80		74,68		74,83		78,92		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:anak)	300	200	200		200		200		200		200		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
	Terlaksananya Penjangkauan Anak- Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	300	200	200		200		200		200		200		Kelompok Subtansi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					14.905.531.300		14.920.291.300		14.910.291.300		14.910.291.300		15.088.525.309	
	Terlaksananya pengelolaan data Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK)	266023	266023	266023		266023		266023		266023		266023		Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					60.000.000		70.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000	Kelompok Subtansi Penanganan Fakir Miskin
	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	311842	826608	826608		810076		793874		777997		762437		Kelompok Subtansi Penanganan Fakir Miskin
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					45.240.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Jaminan Sosial

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	266,023	149187	149187		149187		149187		149187		149187		Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					12.341.091.300		12.341.091.300		12.341.091.300		12.341.091.300		12.341.091.300	Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
	Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	9900	9900	9900		9900		9900		9900		9900		Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		208.234.009	Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin					2.419.200.000		2.419.200.000		2.419.200.000		2.419.200.000		2.419.200.000	Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	12000	12000	12000		12000		12000		12000		12000		Kelompok Subtansi Jaminan Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					858.760.000		909.000.000		911.000.000		913.000.000		1.430.000.000	
	Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana	Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					235.000.000		237.000.000		238.000.000		239.000.000		755.000.000	
	Terselenggaranya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan sosial (Dengan Satuan:korban)	200	1400	1400		1400		1400		1400		1400		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan					20.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	1000	1000		1000		1000		1000		1000		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang					105.000.000		105.000.000		105.000.000		105.000.000		155.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	75	200	200		200		200		200		200		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		200.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					623.760.000		672.000.000		673.000.000		674.000.000		675.000.000	
	Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten / Kota	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:orang)	25000	25000	25000		25000		25000		25000		25000		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					40.000.000		42.000.000		43.000.000		44.000.000		45.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	30	40		40		40		40		40		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	30	30	30		30		30		30		30		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)					533.760.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000		580.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keresasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL) (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Perlindungan Sosial Korban Bencana
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000	
	Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan (Dengan Satuan:makam)	90	90	90		90		90		90		90		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Makam)	90	90	90		90		90		90		90		Kelompok Subtansi Pemberdayaan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial
1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial
	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	16	20		25		30		35		40		Kelompok Subtansi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.735.000.000		1.895.000.000		1.950.000.000		2.005.000.000		1.840.000.000		

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				1.735.000.000		1.895.000.000		1.950.000.000		2.005.000.000		1.840.000.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					430.000.000		440.000.000		445.000.000		450.000.000		455.000.000	
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (Dengan Satuan:persen)	58,56	59,16	59,62		60,07		60,53		60,98		61,44		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					200.000.000		210.000.000		215.000.000		220.000.000		225.000.000	
	Terlaksananya pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembagaan PUG (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	42	41	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Dengan Satuan:Lembaga)	0	41	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000		230.000.000	
	Terlaksananya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi yang melaksanakan Pemberdayaan Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi (Dengan Satuan:organisasi)	25	25	25		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Dengan Satuan:Lembaga)	25	25	25		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02.0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Dengan Satuan:Lembaga)	25	25	25		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02.0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Dengan Satuan:Lembaga)	25	25	25		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN	
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	100	100	100		100		100		100		100		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan (Dengan Satuan:orang)	120	120	120		120		150		150		150		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	41	4	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.01.0006	Advokasi Dan Sosialisasi Pencegahan KtP dan TPPO Kepada Pengambil Kebijakan Dan Pemangku Kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan korrdinasi kewenangan Kabupaten / Kota	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (Dengan Satuan:layanan)	4	4	4		4		4		4		4		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.02.0008	LayananPengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0	18		20		20		25		25		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.02.0009	Layanan Pendampingan Korban Bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	0	18		20		20		25		25		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
	Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten / kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:lembaga)	48	48	50		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (Dengan Satuan:orang)	0	0	15		25		25		25		25		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					640.000.000		790.000.000		840.000.000		890.000.000		640.000.000	
	Meningkatnya peran kelembagaan peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif (Dengan Satuan:%)	70	80	80		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					640.000.000		790.000.000		840.000.000		890.000.000		640.000.000	
	Terselenggaranya Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen pelatihan peningkatan kualitas keluarga (Dengan Satuan:dokumen)	2	4	4		4		4		4		4		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.04.2.01.0004	Penguatan Kerjasama Antar Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi Dan Lintas Kabupaten/Kota					600.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		600.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Lembaga)	0	0	71		71		71		71		71		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.04.2.01.0007	Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Peningkatan Kualitas Keluarga Untuk Mewujudkan KG Dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Dengan Satuan:%)	80	90	90		90		95		95		95		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000	
	Tersajinya Data Gender dan Anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten / Kota yg tersedia (Dengan Satuan :dokumen)	50	50	50		50		55		55		60		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan :Dokumen)	41	41	41		41		41		41		41		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	50	50	50		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000	
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Persentase Sekolah yang lulus evaluasi sekolah ramah anak (Dengan Satuan:%)	100	70,00	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	
	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah non Pemerintah dan Dunia Usaha kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi yg melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan (Dengan Satuan:organisasi)	70	70	70		70		70		70		70		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
	Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi)	50	42	42		42		42		42		42		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	42		42		42		42		42		42		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	
	Terlaksananya Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga peyedia layanan penigkatan kualitas Hidup Anak . (Dengan Satuan:dokumen)	100	3	3		3		3		3		3		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	2	2		2		2		2		2		Kelompok Subtansi Kualitas Hidup Anak
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, pelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tertangani (Dengan Satuan:%)	100	100	100		100		100		100		100		Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pihak yang terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak (Dengan Satuan:lembaga)	5	6	6		6		6		6		6		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50		50		50		50		50		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	10		10		10		10		10		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	
	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Dengan Satuan:layanan)	3	3	3		3		3		3		3		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KETERANGAN
				2025	2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK					5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan:Layanan)	3	3	3		3		3		3		3		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	
	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus (Dengan Satuan:dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota					10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2		Kelompok Subtansi Perlindungan Perempuan dan Anak
			TOTAL:	28.470.884.049		28.732.236.103		28.444.201.577		28.456.786.907		29.006.466.008			

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*),

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*, *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya, Indikator kinerja Dinas Sosial P2PA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P2PA yang Mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Sakip Dinas Sosial P2PA	angka	78,80	79,10	78,85	78,87	78,90	78,95	78,99	
2	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	angka	4,18	4,19	4,20	4,21	4,41	4,51	4,51	
3	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	%	1,67	1,52	1,60	1,68	1,76	1,84	1,92	
4	Persentase PPKS yang terakses Layanan sosial Dasar	%	1,67	1,72	1,77	1,82	1,87	1,92	1,97	
5	Indeks Ketimpangann Gender (IKG)	%	0,326	0,323 - 0,317	0,320 - 0,304	0,321- 0,293	0,319- 0,282	0,317 - 0,271	0,315 - 0,260	
6	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Angka	684,56	600-700	700-800	700-800	800-900	800-900	900-1000	
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91,25	91,25	91,26	91,27	91,28	91,29	91,30	

Tabel 4,3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial P2PAKabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Urusan P2PA									
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	27,66	27,93	28,21	28,50	28,78	29,07	29,36	
4	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	9,36	8,42	7,58	6,82	6,14	5,52	4,97	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Permasalahan Penanganan PMKS/PPKS sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota,

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna,

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai

satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan data kemiskinan secara optimal dan terpadu,

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak dalam mewujudkan Visi Kabupaten Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera.

LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL RENSTRA DINAS SOSIAL P2PA
TAHUN 2025-2029

Pada bagian ini dijabarkan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam Renstra Dinas Sosial P2PA Tahun 2025-2029. Setiap indikator dilengkapi dengan level indikator, nama indikator, satuan, definisi operasional, formulasi perhitungan, jadwal rilis, serta instansi perilis. Penjabaran masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Definisi Operasional

No	Level Indikator	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Jadwal Rilis	Instansi Perilis
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tujuan 1 Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	%	ukuran yang menggambarkan proporsi dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang telah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya secara layak	$\text{Persentase PPKS Mandiri} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang telah mandiri memenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Jumlah seluruh PPKS yang menjadi sasaran / didampingi}} \times 100\%$ Jumlah PPKS yg telah mandiri memenuhi kebutuhan dasar dibagi jumlah seluruh PPKS yg menjadi sasaran/ didampingi x 100 %	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1	Sasaran 1 Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase PPKS yang terakses layanan social dasar	%	kondisi di mana individu atau kelompok yang sebelumnya menerima pelayanan sosial telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya.	$\text{Persentase PPKS Terakses Layanan Sosial Dasar} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terakses layanan sosial dasar}}{\text{Jumlah seluruh PPKS sasaran}} \times 100\%$ Persentase PPKS Mandiri = (Jumlah PPKS Mandiri dibagi Jumlah Total PPKS) X 100 %	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	Sasaran 2 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Sosial P2PA	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	%	Indeks hasil pengukuran kinerja unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan enam aspek penilaian yang menggambarkan kualitas, kepatuhan, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat	$\frac{\text{Jumlah nilai seluruh Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 25$	Tahunan	Bagian Oragnisasi Setda
	Tujuan 2 Mengurangi Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	komposit yang menggambarkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pencapaian perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki, diukur dengan skala		Tahunan	BPS dan Kementerian PPPA

				dari 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 berarti ketimpangan rendah , dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan tinggi .			
	Sasaran 3 Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	angka	ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat pencapaian suatu kabupaten/kota dalam memenuhi indikator-indikator menuju pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara menyeluruh, yang dinilai berdasarkan sistem evaluasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).		Tahunan	Kementerian PPPA
	Sasaran 4 Meningkatkan Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	indikator statistik komposit yang menunjukkan perbandingan capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, yang dihitung berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi . Indeks ini mencerminkan sejauh mana pembangunan manusia telah merata dan adil antara laki-laki dan perempuan.	$IPG = \left(\frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ Laki-laki}} \right) \times IPM$	Tahunan	BPS dan Kementerian PPPA
	PROGRAM 1						
1.1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	Persentase PSKS yang diberdayakan = Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi Jumlah Total PSKS yang teridentifikasi dikali 100 %	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.1.1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kab/Kota	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan social kab/kota	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan social kab/kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.1.1.1	Sub kegiatan : 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/	Orang	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya kewenang kabupaten/kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	Kota	n a n g a n Kabupat en / Kota					
1.1. 1.1. 2	Sub Kegiatan : 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahte raan Sosial K e c a m a t a n K e w e n a n g a n Kabupate n / Kota yang M e n i n g k a t K a p a s i t a s n y a K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan social kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	Jumlah Tenaga Kesejahteraan social kecamatan (TKSK) yang meningkat kapasitasnya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 1.1	Sub kegiatan : 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang M e n i n g k a t K a p a s i t a s n y a K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Keluarga	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenang kabupaten/kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenang kabupaten/kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 2						
1.1. 2	P R O G R A M REHABILI TASI SOSIAL	P e r s e n t a s e p e n y a n d a n g disabilit as terlanta r, anak terlanta r, lanjut usia terlanta r dan g e l a n d a n g a n pengemi s yang terpenuhi kebutuha n dasarnya di luar panti	%	Jumlah individu yang kebutuhan dasarnya terpenuhi dibagi jumlah total individu dalam katagori	Persentase Kebutuhan Terpenuhi= (Jumlah Individu yang Kebutuhan Dasarnya Terpenuhi : Jumlah Total Individu dalam Kat egori?)×100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1	Kegiatan 2 : Rehabilitas i Sosial Dasar Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta G e l a n d a n g a n Pengemis di Luar Panti Sosial	J u m l a h P M Rehabilita si Sosial Dasar Penyanda ng Disabilita s Terlantar, Anak Terlanta r, L a n j u t U s i a T e r l a n t a r , Gelandan gan dan Pengemis di Luar Panti	Orang	Jumlah PM Rehabilitasi di Kab/kota	Jumlah PM Rehabilitasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1. 1	Subkegiatan 4 : Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan permakanan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		k a n Pemenuha n Kebutuhan Permakana n Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanga n Kabupat en / Kota		permakanan			
1.1. 2.1. 2	Sub kehiatan 5 : Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkap an Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenanga n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapanya	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapanya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1. 3	Sub kegiatan 6 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendap atkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai k e b u t u h a n K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1. 4	Sub kegiatan 7 : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupat en / Kota (Dengan Satuan:Ora ng)	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifitasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifitasi keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1. 5	Sub kegiatan 8 : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbinga n Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenanga n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah Pesrta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah Pesrta Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.1. 6	Sub kegiatan 9 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an P e n g e m i s d a	Jumlah Pe serta Bimbinga n Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga	Orang	Jumlah orang penyandang disabilitas,terlan tar, lanjut usia dan gelandangan, pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Jumlah orang penyandang disabilitas,terlantar, lanjut usia dan gelandangan, pengemis yang mendapatkan bimbingan sosial	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	n Masyarakat at	n Pengemis dan Masyarakat at K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota					
1.1.2.1.7	Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan N o m o r I n d u k Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuata n Nomor Induk Kependud ukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandan g Disabilitas K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nik, akta kelahiran, surat nikah dan kia bagi penyandang disabilitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nik, akta kelahiran, surat nikah dan kia bagi penyandang disabilitas	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.2.1.8	Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatk an Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.2.1.9	Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatk an Layanan Data dan Pengaduan K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan	Pertriwulan	Dinsos p2pa
1.1.2.1.10	Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Kedarurata n K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.2.1.11	Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusura n Keluarga Kewenanga n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.2.1.12	Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatk an Layanan Rujukan Kewenanga n Kabupat en / Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

1.1. 2.2.	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan Napza yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 1	Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 2	Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 3	Sub kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 4	Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 5	Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Pertriwulan	Dinsosp2pa

1.1. 2.2. 6	Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbanga n Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenanga n Kabupat en/ Kota	Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 7	Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenanga n Kabupat en/ Kota	Orang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 8	Sub kegiatan : Fasilitasi Pembuatan N o m o r I n d u k Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang M e m b u t u h k a n Pembuata n Nomor Induk Kependud ukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenanga n Kabupat en/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang M e m b u t u h k a n Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang M e m b u t u h k a n Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 9	Sub kegiatan : Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatk an Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar K e w e n a n g a n Kabupat en/ Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2. 10	Sub kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusura n Keluarga	Orang	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		Kewenangan Kabupat en/Kota					
1.1. 2.2. 11	Sub kegiatan : Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 2.2.	Sub kegiatan : Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatk an Layanan Rujukan Kewenanga n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 3						
1.1. 3	P R O G R A M PERLINDU NGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan penduduk m i s k i n y a n g m e m p e r o l e h perlindun gan dan jaminan sosial	%	Cakupan Perlindungan Sosial dibagi total penduduk miskin yang menerima program perlindungan social di bagi penduduk miskin	Cakupan Perlindungan Sosial = (((Total penduduk miskin yang menerima program perlindungan social)x 100%)):totsl penduduk miskin	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.1	Pemelihara an Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak- Anak Terlant ar yang D i j a n g k a u K e w e n a n g a n Kabupat en/Kota	Anak	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang D i j a n g k a u	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang D i j a n g k a u	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.1. 1	Penjangkaua n Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenanga n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah Anak- Anak Terlantar yang Dijangkau	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.2	Pengelola an Data Fakir Miskin Cakupan D a e r a h Kabupate n/Kota	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelola an data	IKK	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.2. 1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Jumlah Fakir Miskin yang terdata	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.2. 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang M e n d a p a t k a n Pengentas an Fakir Miskin Kabupaten /Kota	Keluarga	Jumlah Keluarga fakir miskin yang terdata dan tertangani	Jumlah fakir miskin yang tertangani	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 3.2. 3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (K P M) y a n g Mendapatk	Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (K P M) y a n g Mendapatkan Bantuan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (K P M) y a n g Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		an Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga Kewenanga n Kabupat en/Kota		Kesejahteraan Keluarga			
1.1. 3.2. 4	Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatk an Bantuan P e n g e m b a n g a n Ekonomi Masyarakat K e w e n a n g a n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan P e n g e m b a n g a n Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan P e n g e m b a n g a n Ekonomi Masyarakat	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRA M 4						
1.1. 4	P R O G R A M P E N A N G A N A N BENCANA	Persentas e korban bencana yang pulih fungsi sosialnya	%	Jumlah korban bencana yang pulih fungsi sosialnya dibagi jumlah total korban bencana yang tertangani	Jumlah korban bencana yang pulih fungsi sosialnya dibagi jumlah total korban bencana yang tertangani x 100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 4.1.	Perlindung an Sosial Korban Bencana Alam d a n S o s i a l Kabupate n/Kota	Jumlah korban bencana y ang m e n d a p a t perlindun gan sosial	Orang	Jumlah korban bencana yang m e n d a p a t perlindungan sosial	Jumlah korban bencana yang m e n d a p a t perlindungan sosial	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 4.1. 1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Permakana n 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) K e w e n a n g a n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan permakanan 3x1 Hari	Jumlah orang yang mendapatkan bantuan permakanan 3x1 Hari	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 4.1. 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatk an Pakaian dan Kelengka pan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana K e w e n a n g a n Kabupat en/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1. 4.1. 3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Penangana n Khusus bagi Kelompok Rentan K	Orang	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		ewenangan Kabupaten/Kota					
1.1.4.1.4	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.4.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	Orang	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.4.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 5						
1.1.5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik	%	Jumlah Makam Pahlawan yang tertangani dibagi jumlah makam pahlawan yang ada	Jumlah Makam Pahlawan yang tertangani dibagi jumlah makam pahlawan yang ada X 100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.5.1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	Makam	Jumlah Makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.5.1.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	Jumlah Makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	Jumlah Makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.1.5.1.2	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

1.2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial P2PA	%	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut PEKPPP adalah suatu upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik, yang diukur dari 1. Standarisasi kebijakan pelayanan; 2. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; 3. Kemudahan akses masyarakat mendapatkan layanan; 4. Profesionalisme kinerja penyelenggara layanan; 5. Kondisi sarana prasarana; 6. Digitalisasi pelayanan; 7. Pengelolaan konsultasi dan pengaduan; dan 8. Ketersediaan inovasi pelayanan publik dengan pembobotan berdasarkan peraturan yang berlaku	Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir-02+25% Nilai Indeks Formulir-03 Nilai Indeks Formulir: $\Sigma(\text{nilai per aspek (n)} \times \text{bobot aspek (n)})$ Nilai per aspek = $:\Sigma \text{nilai per indicator}$ Nilai per indikator F02= Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03 : Nilai F03 x bobot per indikator	Pertriwulan	Dinsosp2pa
		Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun evaluasi	Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi APIP atas sistem akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun evaluasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 6						
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Sosial P2PA	Angka	Hasil pengukuran survei kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017	Σ dari nilai persepsi per unsur X nilai Penimbang Σ unsur yang terisi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan	Dokumen	Penyusunan Dokumen Renja Murni, Renja Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, RKA	Penyusunan Dokumen Renja Murni, Renja Perubahan, DPA Murni, DPA Perubahan, RKA Murni, RKA Perubahan, LKJIP, LKPJ, LPPD.	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	Perangkat Daerah	laporan kinerja daerah		Murni, RKA Perubahan, LKJIP, LKPJ, LPPD.			
1.2.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : Renja Murni, Renja Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : RENJA MURNI, RENJA PERUBAHAN	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : RKA Murni, RKA Perubahan	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD : RKA MURNI, RKAP	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : DPA Murni, DPA Perubahan	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD : DPA, DPAP	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : LKJIP, LKPJ,LPPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : LKJIP, LKPJ,LPPD	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	Persentase Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah : LK dan CaLK	Persentase Pemenuhan administrasi dan laporan keuangan perangkat daerah : LK dan CaLK	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan)	Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : PNS & PPPK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : PNS & PPPK	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah laporan BMD PD yang sudah di	Laporan	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan	Tingkat pemenuhan Administrasi dan laporan pengelolaan Barang Milik Daerah : LAPORAN BMD SEMESTERAN	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	Perangkat Daerah	r e k o n s i l i a s i		Barang Milik Daerah : Laporan BMD Semesteran			
1.2. 1.3. 1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Laporan BMD Semester 1 & 2	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : LAPORAN BMD SEMESTER 1 & 2	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.4	A d m i n i s t r a s i K e p e g a w a i a n Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e A d m i n i s t r a s i K e p e g a w a i a n Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	Jumlah Pegawai yang terpenuhi administrasinya di bagi jumlah pegawai yang ada	Jumlah Pegawai yang terpenuhi administrasinya di bagi jumlah pegawai yang ada X 100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.4. 1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Orang	Jumlah Pakaian dinas yang terpenuhi di bagi jumlah pegawai	Jumlah Pakaian dinas yang terpenuhi di bagi jumlah pegawai x 100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.4. 2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : ASN dan Honorer	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan : ASN dan Honorer	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.4. 3	Sosialisasi Peraturan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.5.	Administra si Umum Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	pegawai yang mendapatkan layanan administrasi perkantoran	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.5. 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	J u m l a h P a k e t Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket Rekening Belanja	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : Paket Rekening Belanja	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.5. 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket Rekening	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Paket Rekening	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.5. 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket Rekening	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : Paket Rekening	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2. 1.5.	Penyediaan Barang C	Jumlah Paket	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang	Pertriwulan	Dinsosp2pa

4	etakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		dan Penggandaan yang Disediakan : Paket Rekening	Disediakan : Paket Rekening		
1.2.1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Peraturan Peundang-undangan yang disediakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dokumen Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu selama 1 (satu) tahun	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDselama 1 (satu) tahun	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDselama 1 (satu) tahun	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Surat Masuk dan Keluar	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD : Surat Masuk dan Keluar	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.5.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	Unit	Pengadaan Barang/ target pengadaan X 100	Pengadaan Barang/ target pengadaan X 100	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan : Motor dinas	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.6.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	meja kursi kerja, lemari penyimpanan arsip alih media	meja kursi kerja, lemari penyimpanan arsip alih media	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.6.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		Lainnya yang Disediakan					
1.2.1.6.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang tersedia di bagi jasa penunjang yang di butuhkan	Jumlah laporan jasa penunjang urusan yang tersedia di bagi jasa penunjang yang di butuhkan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.7.2	Penyediaan n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 1 (satu) tahun	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan selama 1 (satu) tahun	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara	%	Jumlah barang BMD yang dipelihara di bagi BMD yang ada	Jumlah barang BMD yang dipelihara di bagi BMD yang ada x 100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.1	Penyediaan n Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.2	Penyediaan n Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.3	Pemeliharaan n Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.4	Pemeliharaan n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : komputer, printer, sound system	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : komputer, printer, sound system	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.5	Pemeliharaan n/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		Dipelihara/Direhabilitasi			
1.2.1.8.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : AC, CCTV dan Apar	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi : AC, CCTV dan Apar	Pertriwulan	Dinsosp2pa
1.2.1.8.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	Jumlah sapras yang dipelihara	Jumlah sapras yang dipelihara	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2	Mengurangi Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketidaksetaraan atau ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian berbagai aspek pembangunan manusia		Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Skor Kabupaten Layak Anak (KLA) (angka)	Angka	nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem pembangunan berbasis hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan	nilai kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kabupaten/kota dalam menyelenggarakan sistem pembangunan berbasis hak anak secara menyeluruh dan berkelanjutan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 7						
2.1.1	P R O G R A M PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	%			Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1.1.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi yg melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintahan	Organisasi	Jumlah organisasi yg melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA	Jumlah organisasi yg melaksanakan kegiatan kelembagaan PHA	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang	Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi Kebijakan an P e n d a m p i n g a n Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha)					
2.1.1.1.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1.1.2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penigkatan kualitas Hidup Anak .	Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga peyedia layanan	Jumlah dokumen kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga peyedia layanan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1.1.2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan P e n d a m p i n g a n Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1.1.2.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	PROGRA M 8						
2.1. 2	P R O G R A M P E R L I N D U N G A N K H U S U S A N A K	Persentas e kasus kekerasa n terhadap a n a k y a n g tertangan i	%	Jumlah anak korban kekerasan yang menerima layanan komprehensif)×1 00% (Jumlah total anak korban kekerasan dan/atau TPPO yang teridentifikasi	Jumlah anak korban yang menerima layanan komprehensif)×100% (Jumlah total anak korban kekerasan dan/atau TPPO yang teridentifikasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.1.	P e n c e g a h a n Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup D a e r a h Kabupate n / Kota	Jumlah pihak yang terlibat dalam p e n c e g a h a n kekerasan terhadap anak	Lembaga	Jumlah lembaga yang terlibat dalam p e n c e g a h a n kekerasan terhadap anak	Jumlah lembaga yang terlibat dalam p e n c e g a h a n kekerasan terhadap anak	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.1. 1	A d v o k a s i d /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperole h advokasi dan Pendampin gan dalam pelaksanaa n kebijakan /program/ kegiatan pencegaha n K T A	Orang	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.1. 2	koordinasi da n sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak ke w e n a n g a n kabupaten /kota	jumlah dokumen hasil koordin asi dan s i n k r o n i s a s i pencegah an kekerasa n terhada p anak ke w e n a n g a n kabupate n / kota	Dokume n	jumlah dokumen hasil koordinasi dan s i n k r o n i s a s i pencegahan kekerasan terhadap anak	jumlah dokumen hasil koordinasi dan s i n k r o n i s a s i pencegahan kekerasan terhadap anak	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.1.	Penyediaa n Layanan bagi Anak yang M e m e r l u k a n Perlindung an Khusus yang Memerluk an Koordinasi Tingkat D a e r a h Kabupate n / Kota	Jumlah layanan bagi a n a k y a n g m e m e r l u k a n perlindun gan khusus	Layanan	Jumlah layanan bagi a n a k y a n g m e m e r l u k a n perlindungan khusus	Jumlah layanan bagi a n a k y a n g m e m e r l u k a n perlindungan khusus	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.1. 1	Koordinasi Pelaksanaa n Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatk an layanan	Layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.1. 2.2.	Penguata n da n P e n g e m b a n g a n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Jumlah Dokumen Penguat an dan Pengem bangan Lembaga Penyedia Layanan	Dokume n	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengemb angan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Jumlah Dokumen Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus					
2.1. 2.2. 1	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten /kota	Dokumen	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2	Meningkatnya Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender	%	pendekatan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara perempuan dan laki-laki	IPG=IPMLaki-lakil dibagi PMPerempuan×100	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 9						
2.2. 1	P R O G R A M PENGARUS UTAMAAN G E N D E R D A N P E M B E R D A Y A A N PEREMPUAN	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	Jumlah Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan dibagi jumlah perempuan	Jumlah Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan dibagi jumlah perempuan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.1.	P e l e m b a g a a n Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembaagaan PUG)	PD	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembaagaan PUG)	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pelembaagaan PUG)	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.1. 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.1. 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender(PUG) Kewenangan Kabupaten /Kota)	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	Kabupaten/ Kota	l a k s a n a a n Pengarus tamaan Gender(P UG) K e w e n a n g a n Kabupat en / Kota		n Gender(PUG)			
2.2. 1.1. 3	Advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyelengga raan PUG kewenangan Kab/Kota	J u m l a h S D M yangmem peroleh advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyeleng garaan PUG	Orang	J u m l a h S D M yangmemperole h advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyelenggaraa n PUG	J u m l a h S D M yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyelenggaraan PUG	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.1. 4	Sosialisasi kebijakan penyelengga raan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyeleng garaan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraa n PUG tingkat Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.2.	P e m b e r d a y a a n Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada O r g a n i s a s i Kemasya rakatan K e w e n a n g a n Kabupate n / Kota	Jumlah Organisas i yang melaksan akan P e m b e r d a y a a n Peremp uan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Organisa si	Jumlah Organisasi yang melaksanakan P e m b e r d a y a a n Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi yang melaksanakan P e m b e r d a y a a n Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.2. 1	Advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi kemasyar akatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkata n partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga	Jumlah organisasi kemasyaraka tan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.2. 2	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi K e w e n a n g a n Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga masyarak at dan pemerinta h tingkat Kabupaten / Kota yang mendapatk an advokasi	Lembaga	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kot a yang mendapatkan advokasi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 1.2. 3	Pendampi ngan lembaga m a s y a r a k a t p e m b e r d a y a a n perempuan di bidang politik, atau hukum, atau	jumlah lembaga masyarak at yang m e n d a p a t k a n p e n d a m p i n g a n	Lembaga	jumlah lembaga masyarakat yang m e n d a p a t k a n p e n d a m p i n g a n	jumlah lembaga masyarakat yang m e n d a p a t k a n p e n d a m p i n g a n	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota						
2.2.1.2.4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.1.2.5	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRAM 9						
2.2.2..	PROGRAM PERLIN DUNGAN PEREMPUAN	Perse ntase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	Jumlah perempuan korban yang menerima layanan komprehensif)×100% (Jumlah total perempuan korban kekerasan dan/atau TPPO yang teridentifikasi	Jumlah perempuan korban yang menerima layanan komprehensif)×100% (Jumlah total perempuan korban kekerasan dan/atau TPPO yang teridentifikasi	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Orang	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa

		Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.2.2.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Layanan	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2.2.3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan	Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	n / Kota						
2.2. 2.3. 1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penangan an bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten/ Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penangan an bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenanga n Kabupaten /Kota yang Mendapat Peningkata n Kapasitas	Orang	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kot a yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRA M 10						
2.2. 3.	P R O G R A M P E N I N G K A T A N KUALITAS KELUARGA	Persentas e lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	%	Jumah lembaga penyedia layanan yang aktif x 100 % Jumlah total lemabaga penyedia layanan yang terdaftar	Jumah lembaga penyedia layanan yang aktif x 100 % Jumlah total lemabaga penyedia layanan yang terdaftar	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 3.1.	Peningkata n Kualitas Keluarga dal am M e w u j u d k a n Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Da erah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen p e l a t i h a n peningkat an kualitas keluarga	Dokume n	Jumlah dokumen p e l a t i h a n peningkatan kualitas keluarga	Jumlah dokumen p e l a t i h a n peningkatan kualitas keluarga	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 3.1. 1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak ba gi K e l u a r g a K e w e n a n g a n Kabupaten /Kota	Jumlah Komunikas i, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindung an Anak bagi Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten /Kota yang Tersedia	Dokume n	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten/Kot a yang Tersedia	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 3.1. 2	Pengembang an Kegiatan Masyaraka t untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil P e n g e m b a n g a n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkata n Kualitas Keluarga K e w e n a n g a n Kabupat en /Kota	Dokume n	Jumlah Dokumen Hasil P e n g e m b a n g a n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil P e n g e m b a n g a n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten/ Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa
	PROGRA M 11						
2.2. 4.	P R O G R A M PENGELOL	Tingkat Pemanfaa tan Data	%	(Jumlah total unit kerja/lembaga	(Jumlah total unit kerja/lembaga yan g menggunakan data gender dan anak)×100%	Pertriwulan	Dinsosp2pa

	AAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Gender dan A n a k d a l a m P e r e n c a n a a n , Evaluasi dan/atau P e n y u s u n a n Kebijakan		yan g menggunakan data gender dan anak)×100% Jumlah unit kerja / lembaga yang ada di kabupaten Demak	Jumlah unit kerja / lembaga yang ada di kabupaten Demak		
2.2. 4.1.	P e n g u m p u l a n , Pengolaha n Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembaga an Data di Tingkat D a e r a h Kabupate n/Kota	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Kabupate n / Kota yg tersedia	Dokume n	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten / Kota yg tersedia	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten / Kota yg tersedia	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 4.1. 1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten /Kota yang Tersedia	Dokume n	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kot a yang Tersedia	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pertriwulan	Dinsosp2pa
2.2. 4.1. 2	Penyajian da n Pemanfaat an Data Gender dan Anak dalam Kelembagaa n Data di K e w e n a n g a n Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penyajia n d an Pemanfaa tan Data Gender dan Anak dalam Kelembaga an Data di Kewenanga n Kabupat en/Kota	Dokume n	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pertriwulan	Dinsosp2pa

